

**ANALISIS KEBIJAKAN TRANSFER PAYMENT PADA DANA
DESA DI ERA PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus : Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan,
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh:

Nama : Hafiz Fadli
NPM : 1705180013
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : HAFIZ FADLI
NPM : 1705180013
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN TRANSFER PAYMENT PADA DANA DESA DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS : KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGI KABUPATEN ASAHAN SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si)

Penguji II

(HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E, M.M, M.Si)

Sekretaris

(Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : HAFIZ FADLI

N.P.M : 1705180013

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN TRANSFER PAYMENT PADA
DANA DESA DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI
KASUS: KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGGE
KABUPATEN ASAHAN SUMATERA UTARA)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2021

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **HAFIZ FADLI**

NPM : 1705180013

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Riset Ekonomi & Bisnis

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “ANALISIS KEBIJAKAN TRANSFER PAYMENT PADA DANA DESA DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS: KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGGE KABUPATEN ASAHAN SUMATERA UTARA)” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



HAFIZ FADLI

ABSTRAK

Dalam Skripsi ini, penulis mengangkat judul "Analisis Kebijakan Transfer Payment Pada Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 (Studi kasus: Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keluarga penerima manfaat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dengan teknik analisis deskriptif melalui hasil kuesioner dan wawancara. Dengan populasi yang digunakan adalah masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dengan penentuan sampel melalui *area (Cluster) sampling dan rumus Slovin*. Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah untuk membangun dan memperkuat daerah – daerah dan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Di-Era Pandemi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada perekonomian rumah tangga. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa adalah bantuan berupa uang tunai dan pekerjaan kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang tepat dalam proses pendataan dan penetapan penerima bantuan karena ada beberapa proses yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku sehingga dapat mengakibatkan timbulnya tindak kecurangan dan salah sasaran, minimnya fasilitas informasi dilingkungan kantor desa maupun sekitaran desa, serta telah dilaksanakan pengawasan dalam proses penyaluran dana kepada penerima.

Kata kunci: *Transfer Payment, Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas nikmat kesehatan, kesempatan, dan diberikan-Nya kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Shalawat beriring salam tak lupa penulis hadiahkan pada jungjungan Rasulullah Muhammad SAW, semoga syafaat beliau tercurah bagi penulis dan pembaca sekalian.

Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis sebagai seorang mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara ini. Selain itu, penulis juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun judul penelitian yang penulis buat yaitu : **“Analisis Kebijakan Transfer Payment Pada Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19, (Studi Kasus ; Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara)”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, dan juga semangat dari berbagai pihak yang ada sehingga dapat membuat penulis Semangat, tekun, dan giat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya atas jasa dan segalanya yang telah diberikan berbagai pihak tersebut terutama kepada :

1. **ALLAH SWT.** yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada penulis. Dan atas izin-Nya Yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Teristimewa untuk kedua orangtua, penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada Ayahanda Madi Riswanto dan Ibunda Eka Budi Susila serta kedua adik penulis yaitu Laila Fikriyah dan Aufa Nurul Izzah yang penulis sayangi dan cintai yang telah memberikan dukungan moril, materil dan spiritual yang tiada terhingga kepada penulis dan juga seluruh kasih sayang yang diberikan;

3. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

4. Bapak H. Januri., S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

5. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS., S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

6. Ibu Dra. Roswita Hafni, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini;

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta seluruh staff selaku pihak – pihak yang telah memberikan segudang ilmu, pengetahuan, pengalaman yang dipunya kepada penulis pada saat menjalani kegiatan perkuliahan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga selesai;

8. Kepada seluruh sahabat Mahasiswa/i Kelas A Pagi Ekonomi Pembangunan angkatan 2017 dan Keluarga Besar Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat serta dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai;

9. Kepada sahabat seperjuangan Ade Gusti Vianda, Andryan Septian, Tapriadi Nasution, Wahyu Ramadhan, M. Ariandi Putra yang selalu berbagi cerita bersama, saling memotivasi, support yang tiada hentinya.

10. Seluruh pihak yang terlibat dan membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT;

Penulis menyadari bahwasanya didalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati memohon kepada semua pihak untuk dapat memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis agar kedepannya penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, atas segala bimbingan, bantuan, motivasi dan seluruh yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dengan

sebagaimana mestinya. Penulis tidak dapat membalasnya kecuali dengan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak tersebut dan berdo'a kepada Allah SWT dan memberikan shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala sesuatu yang diberikan tersebut diberikan imbalan pahala dan juga dimudahkan segala rezeki serta urusannya. Pada akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan berharap semoga penulisan skripsi ini dapat penulis lanjutkan hingga akhirnya selesai dan memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Amiin.....

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2021

Penulis

Hafiz Fadli

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	25
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah	26
1.3.1 Batasan Masalah	26
1.3.2 Rumusan Masalah.....	27
1.4 Tujuan Penelitian.....	27
1.5 Manfaat Penelitian.....	27
1.5.1 Manfaat Akademik	27
1.5.2 Manfaat Non-akademik	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 Landasan Teoritis	29
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi	29
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	40
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah	54
2.1.4 Kebijakan Dana Desa.....	62
2.2 Penelitian Terdahulu.....	69
2.3 Tahapan Penelitian	70
2.3.1 Kerangka Analisis Penelitian.....	70
2.3.2 Kerangka Konseptual.....	71
BAB III METODE PENELITIAN	72
3.1 Pendekatan Penelitian.....	72
3.2 Definisi Operasional.....	72
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	74

3.3.1 Tempat Penelitian	74
3.3.2 Waktu Penelitian.....	74
3.4 Jenis dan Sumber Data	74
3.4.1 Jenis Data.....	74
3.4.2 Sumber Data	74
3.5 Teknik Pengumpulan Data	74
3.6 Populasi dan Sampel	75
3.7 Teknik Analisis Data	78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	79
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	79
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Asahan.....	79
4.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Asahan.....	83
4.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Asahan.....	88
4.1.4 Kondisi Sosial Kabupaten Asahan.....	92
4.2 Analisis Penelitian	95
4.2.1 Analisis Perkembangan Transfer Payment Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	95
4.2.2 Analisis dan Evaluasi Perkembangan Dana Desa Pada Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai (PKT) di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	129
5.1 Kesimpulan.....	129
5.2 Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2018-2021	19
Tabel 1.2 Anggaran Dana Desa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Tahun 2021	23
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	69
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	73
Tabel 3.2 Jumlah Sampel	78
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan	80
Tabel 4.2 Tinggi Wilayah Kecamatan di Kabupaten Asahan	82
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Asahan 2017 (Jiwa)	84
Tabel 4.4 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2015.....	87
Tabel 4.5 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan Utama	88
Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Asahan 2016-2020	89
Tabel 4.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandar Pasir Mandoge, Huta Padang, Suka Makmur Tahun 2019 dan 2020	109
Tabel 4.8 Jenis Kelamin Responden	114
Tabel 4.9 Usia Responden	115
Tabel 4.10 Jenis Pekerjaan Responden	116
Tabel 4.11 Tingkat Penghasilan Perbulan.....	117

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015 – 2020	3
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-IV 2020.....	5
Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2015-2020.....	7
Gambar 1.4 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).....	9
Gambar 1.5 Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2021	13
Gambar 1.6 Status Desa Dalam Indeks Pembangunan Desa 2014 & 2020....	16
Gambar 1.7 Anggaran Dana Desa Provinsi Sumatera Utara 2015-2020.....	18
Gambar 1.8 Anggaran Dana Desa Kabupaten Asahan 2018-2021	21
Gambar 1.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asahan 2016-2020	22
Gambar 2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	57
Gambar 2.2 Kurva Peacock dan Wiseman.....	58
Gambar 2.3 Kurva Wagner, Solow dan Musgrave	59
Gambar 2.4 Kerangka Analisis Penelitian	70
Gambar 2.5 Bagan Konseptual	71
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Asahan	80
Gambar 4.2 Grafik Penduduk Kabupaten Asahan	85
Gambar 4.3 Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Asahan.....	86
Gambar 4.4 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020	93
Gambar 4.5 Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020	94
Gambar 4.6 Grafik APBN Tahun 2018-2021	98

Gambar 4.7 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi 2018 & 2019.....	100
Gambar 4.8 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi 2020 & 2021	101
Gambar 4.9 Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2021	104
Gambar 4.10 Perkembangan Dana Desa Asahan Tahun 2015-2021	107
Gambar 4.11 Alur Pendataan & Penerima BLT sesuai Peraturan	112
Gambar 4.12 Alur Pendataan & Penerima BLT yang diterapkan diKecamatan Bandar Pasir Mandoge	112
Gambar 4.13 Mekanisme Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa.....	113
Gambar 4.14 Jenis Kelamin Responden	114
Gambar 4.15 Usia Responden.....	115
Gambar 4.16 Jenis Pekerjaan	116
Gambar 4.17 Tingkat Penghasilan Perbulan.....	117
Gambar 4.18 Pengetahuan Tentang Dana Desa.....	118
Gambar 4.19 Ketersediaan Informasi	118
Gambar 4.20 Proses Pendataan	119
Gambar 4.21 Proses Penyaluran/Penerimaan	120
Gambar 4.22 Penurunan Pendapatan	121
Gambar 4.23 Membantu Meningkatkan Daya Beli dan Memenuhi Kebutuhan Pokok Rumah Tangga dimasa Pandemi.....	122
Gambar 4.24 Pelayanan, Informasi, Fasilitas Kinerja.....	123
Gambar 4.25 Proses Pendaftaran/Rekrutmen	124
Gambar 4.26 Sistem Gaji/Upah	125
Gambar 4.27 Membantu Meningkatkan Daya Beli	125
Gambar 4.28 Pelayanan, Informasi, Fasilitas Kinerja	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi; potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia termasuk ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk giat membangun baik dari sektor ekonomi, pengadaan infrastruktur maupun pembangunan Sumberdaya Manusia. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian.

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan Kesejahteraan Umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan dimaksud agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik itu dari bidang ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yaitu tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapat masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat.

Selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi diluar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:55). Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang. (Sadono Sukirno, 1985:13).

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran yang utama. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan ketimpangan pembangunan pada setiap daerah. Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan jika tidak dapat diatasi

secara hati-hati akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Wilayah maju terus meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor non unggulan yang membebani (Andhiani, Erfit, & Bhakti, 2018).

Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional riil yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) yang berlaku dari tahun ke tahun. Berikut ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut;

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2020



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020 (www.bps.go.id)

Pada gambar di atas, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sampai 2018 di Indonesia pertumbuhannya mengalami peningkatan hanya sedikit. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi 4.88%, tahun 2016 5.03%, tahun 2017 5.07%,

dan tahun 2018 5,17%. Di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,02%, tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar -2,07%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 menunjukkan penurunan akibat dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh seluruh dunia. Pandemi Covid-19 melemahkan sektor ekonomi karena tingkat daya beli masyarakat menurun.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Sebab, tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Negara dapat dikatakan sejahtera jika output perkapita meningkat. Dalam literatur ekonomi makro, tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan PDB per kapita. Makin tinggi PDB per-kapita, makin sejahtera masyarakat. Agar PDB per-kapita terus meningkat maka perekonomian harus terus tumbuh dan harus lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk.

Pada tahun 2020, dunia sedang mengalami wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh virus SAR-COV-2. COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia, dan dapat menyerang siapapun dalam segala jenis usia. Virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus Covid-19 menyebar dengan cepat sehingga pada Januari 2020, virus itu mulai merambah ke-31 provinsi di China. *World*

Health Organization (WHO) sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau yang juga disebut *corona virus disease* 2019 (COVID-19), Covid-19 menyebar secara cepat hampir keseluruhan negara termasuk Indonesia. Indonesia sendiri termasuk negara dengan jumlah kasus covid-19 tertinggi di dunia dan jumlah kasus tertinggi pertama di Asia Tenggara.

Pandemi Covid-19 menghantam sektor perekonomian setiap negara yang terdampak. Salah satu dampak pandemi Covid-19 dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dimana setiap negara mengalami penurunan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya, hal ini dirasakan langsung oleh seluruh negara baik negara maju maupun negara berkembang. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 pada data gambar dibawah ini.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-IV Tahun 2020



Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-IV 2020

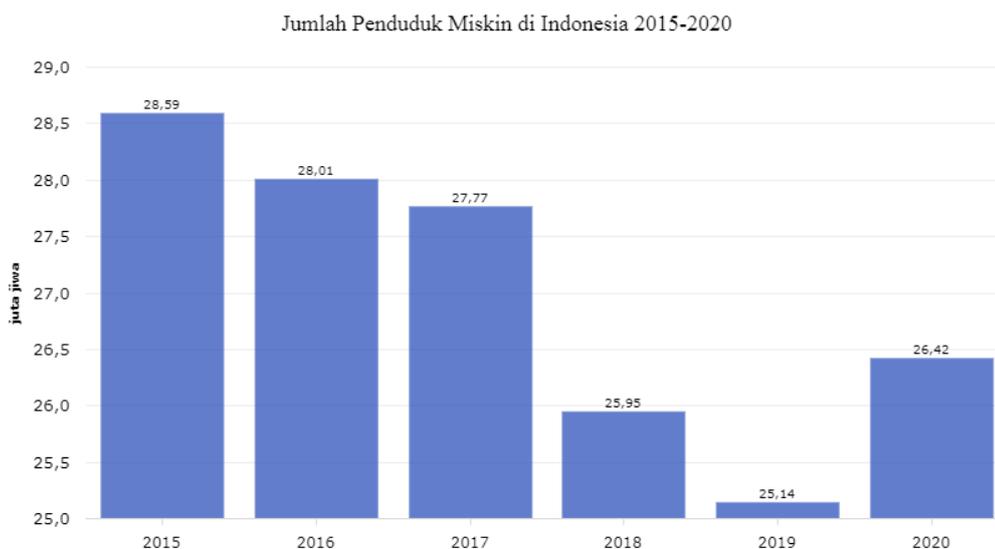
Sumber : Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan II tahun 2020. Triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 5,07. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana Covid-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi Indonesia -5,32%, Hal disebabkan dampak pandemi covid-19 yang meluas dan memukul hampir semua sektor perekonomian nasional. Pada triwulan III, pertumbuhan ekonomi Indonesia -3,49%, Hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah (turning point) dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan, maupun dari sisi produksi. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19% (yoy) membaik dari pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar -3,49% (yoy). Tren perbaikan pada triwulan IV 2020 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07% pada tahun 2020.

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan hebat pada perekonomian Indonesia. Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 salah satunya melalui penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Upaya tersebut berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. Lesunya kegiatan ekonomi pada berbagai sektor menyebabkan pertumbuhan ekonomi melemah di

sepanjang tahun 2020. Kondisi ini tentunya memberikan tantangan bagi Pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah penurunan tingkat pendapatan dan ketahanan pangan. Hasil survey yang dilakukan oleh World Bank (2020) menunjukkan bahwa terdapat 24 persen dari kepala keluarga yang menjadi sample survey berhenti bekerja, 64 persen kepala keluarga yang masih bekerja mengalami penurunan pendapatan, dan sekitar 30% rumah tangga melaporkan kekurangan makanan. Isu peningkatan kemiskinan menjadi tantangan penting lainnya bagi Pemerintah di masa pandemi. Suryahadi, et al. (2020) mengestimasi bahwa pandemi Covid-19 dapat meningkatkan jumlah orang miskin baru sebesar 1,3 hingga 8,45 juta. Berdasarkan hasil tersebut, intervensi Pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah peningkatan tingkat kemiskinan. Berikut ini data jumlah penduduk miskin Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia tahun 2015-2020



Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia tahun 2015-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai tahun 2020, laporan Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 26,42 juta. Angka ini naik 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 25,14 juta. Meningkatnya angka kemiskinan Indonesia dari tahun 2019 ke-tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah penduduk miskin Indonesia cenderung turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 28,59 juta, lalu pada tahun 2016 menjadi 28,01 juta. Pada tahun 2017 jumlahnya menjadi 27,77 juta dan pada tahun 2018 menjadi 25,95 juta. Masih tingginya angka kemiskinan Indonesia disebabkan pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

Pandemi virus corona telah menekan sektor konsumsi yang selama ini selalu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk merespon isu kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19, Pemerintah hadir melalui berbagai program perlindungan sosial untuk menggerakkan konsumsi masyarakat tersebut yang menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 9 Mei lalu. Definisi PEN sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 poin (1) tersebut adalah, rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak covid-19 pada perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Sementara Pasal 2 menyatakan tujuannya untuk “melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.” Prinsip pelaksanaan PEN, seperti termaktub dalam Pasal 3, yakni

berasas keadilan sosial; untuk kemakmuran rakyat; mendukung pelaku usaha; menerapkan kaidah-kaidah kebijakan penuh kehati-hatian serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan; tidak menimbulkan moral hazard; dan pembagian biaya dan risiko antar pemangkau kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.



Gambar 1.4 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Sumber : Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan keterangan diatas program pemulihan ekonomi nasional sebagai bentuk langkah yang diambil oleh pemerintah. Pada penanganan Kesehatan pemerintah menggelontarkan anggaran sebesar Rp87,55 triliun. Alokasi ini dipergunakan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 yang meliputi pengadaan fasilitas kesehatan dan karantina di rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga kesehatan, dan pengadaan alat tes COVID-19. Stimulus juga diberikan dalam bentuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, termasuk pemberian santunan kematian bagi para tenaga kesehatan yang gugur saat melakukan penanganan COVID-19 dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L dan Pemda) sebesar Rp106,11 triliun, untuk mendorong penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat setempat, serta perluasan alternatif pendanaan bagi Pemda dalam bentuk pinjaman PEN daerah, khususnya bagi daerah- daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak COVID-19 yang relatif parah agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerahnya. Dukungan sektor UMKM sebesar Rp123,46 triliun dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional karena UMKM berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dukungan pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun untuk menjaga keberlangsungan usaha korporasi di tengah pandemi, khususnya bagi korporasi padat karya melalui pemberian fasilitas restrukturisasi dengan skema penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah. Pemberian insentif usaha dengan anggaran sebesar Rp120,61 triliun. Program ini ditujukan untuk membantu upaya dunia usaha dalam meminimalisir

terjadinya kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja serta menggerakkan sektor perekonomian, dukungan diberikan dalam bentuk insentif perpajakan. Dan terakhir Perlindungan sosial dengan anggaran sebesar Rp203,90 triliun. Program ini difokuskan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti buruh bangunan, pekerja pabrik, petani, pedagang kecil, dan lain-lain. Dukungan perlindungan sosial diwujudkan melalui sejumlah program intervensi langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Sembako Jabodetabek, serta intervensi tidak langsung berupa diskon tarif listrik dan Kartu Pra-Kerja. Program perlindungan sosial merupakan salah satu prioritas utama dalam Program PC-PEN untuk mendukung daya beli dan konsumsi masyarakat, khususnya dari kelompok masyarakat miskin dan rentan.

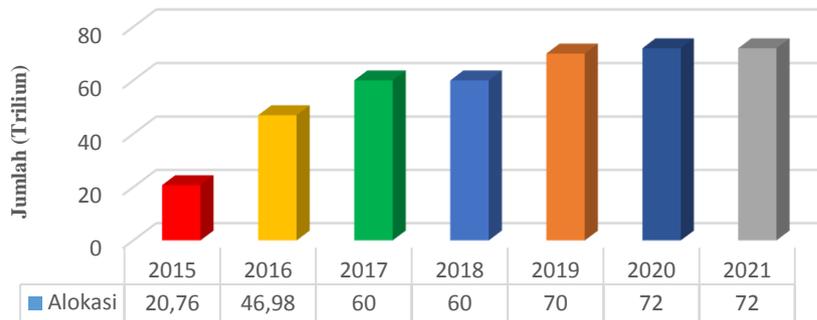
Dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada sektor perlindungan sosial terdapat didalamnya bantuan langsung tunai dana desa dan padat karya tunai desa yang bersumber dari anggaran dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kab/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan

pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi corona covid-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemi. Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDes. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.

Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah mengangarkan Dana Desa sebagai salah satu penanganan pandemi covid-19, berikut anggaran Dana Desa dari tahun 2015 sampai tahun 2021.

Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2021 (Triliun)



Dana Desa 2015-2021 Rp 401,74 Triliun

■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

Gambar 1.5 Anggaran Dana Desa

Sumber : Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Dilihat dari grafik diatas, tren anggaran dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Alokasi dana desa dari APBN sebesar Rp 20,76 triliun dengan rata-rata setia desa mendapat alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016 alokasi dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 46,98 trilion naik 1 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun untuk dana desa dengan rata-rata perdesa mendapatkan sebesar Rp 800,4 juta. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 46,98 triliun. Tahun 2018 anggaran untuk dana desa tidak mengalami peningkatan dan penurunan, sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp 60 triliun. Pada tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 70 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 933 juta. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 anggaran dana desa meningkat sebesar Rp 72 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 960 juta. Total Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2021 mencapai Rp 401,74 triliun.

Sesuai dengan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKTD. Dimasa pandemi ini pemerintah memprioritaskan penglokasian/penggunaan Dana Desa untuk : (1) Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (2) Padat Karya Tunai Desa (PKTD). (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

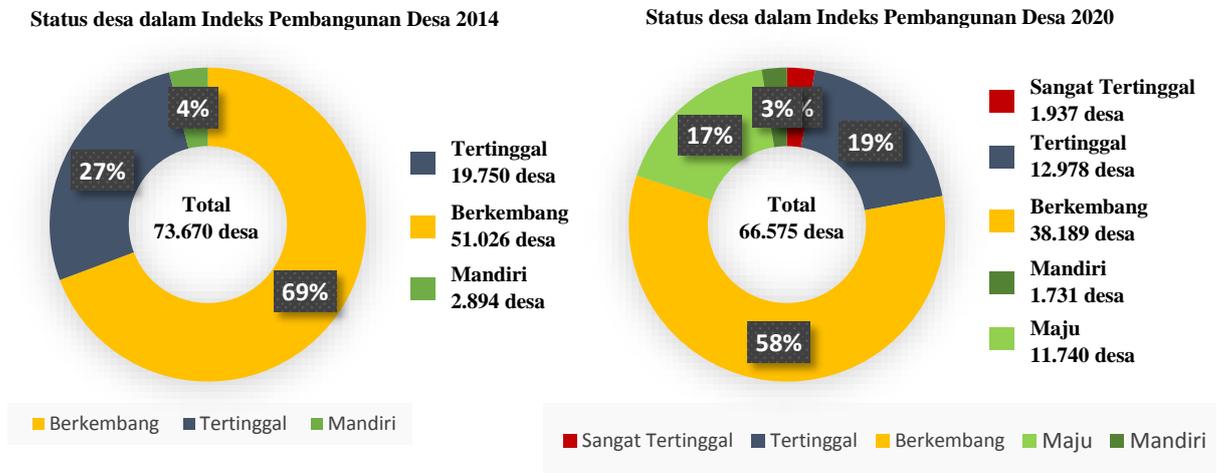
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat, kemudia Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai ialah keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi syarat yaitu tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja, mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Menyusul Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan mempertimbangkan situasi dan kondisi

terkini evaluasi desa tanggap COVID-19, maka dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kriteria pelaksanaan padat karya tunai desa ; (1) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya. (2) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD. (3) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari. (4) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.

Penetapan kebijakan Dana Desa ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pihak yang mendukung kebijakan ini merasa bahwa wilayah perdesaan selalu menjadi wilayah yang terpinggirkan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan alokasi dana untuk pembangunan desa. Sejak adanya dana desa untuk memenuhi target pembangunan desa, pemerintah memetakan pembangunan desa berdasarkan tingkat

pembangunannya, berikut perbandingan Indeks Pembangunan Desa tahun 2014 dan 2020.



Gambar 1.6

Status Desa Dalam Indeks Pembangunan Desa 2014 & 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Sumber : <https://idm.kemendes.go.id> 2020

Berdasarkan data diatas hasil Publikasi IPD tahun 2014, desa mandiri berjumlah 2.894 desa; desa berkembang berjumlah 51.026 desa; dan desa tertinggal berjumlah 19.750 desa. Pada tahun 2020 desa mandiri berjumlah 1.731 desa; desa maju berjumlah 11.740 desa; desa berkembang berjumlah 38.189 desa; dan desa tertinggal berjumlah 12.978 desa; kemudian desa sangat tertinggal berjumlah 1.930 desa. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi, terpetakan menurut kondisi pembangunan desa. Namun, untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa dari tahun 2014 dan 2020, dilakukan penyamaan desa antara 2014 dan 2020. Hal ini bertujuan, supaya pembangunan yang wilayah yang dilaksanakan antara tahun 2014 dan 2020 merujuk pada suatu wilayah yang sama. Dengan demikian, perlu direduksi dengan menyatukan kembali desa yang mengalami pemekaran dan menyesuaikan kembali desa yang mengalami penggabungan sejak 2014 hingga 2020. Sehingga wilayah desa yang dapat dilihat perkembangannya secara panel 2014 sebesar 73.670 desa

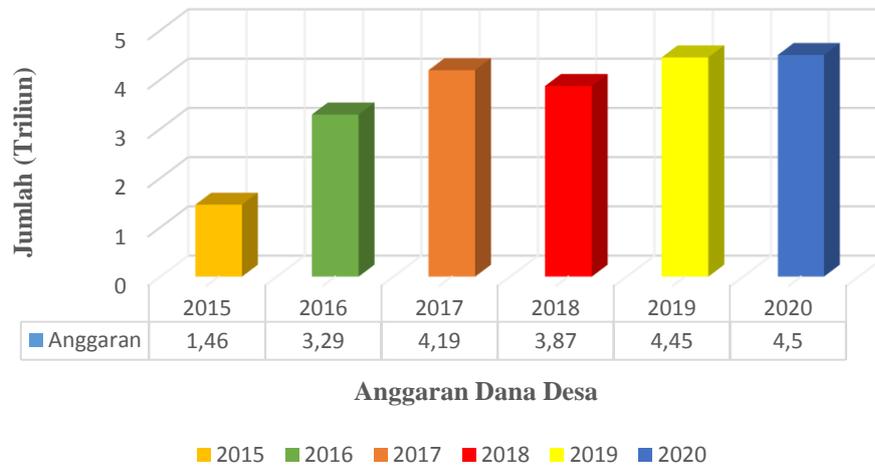
dan 2020 sebesar 66.575 desa. Perkembangan pembangunan desa yang secara panel ini dilakukan untuk mengetahui realitas pembangunan desa yang sesungguhnya, dan memperkirakan seberapa besar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa serta skala kriteria yang bertambah yaitu desa sangat tertinggal dan desa maju.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berada pada posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional yang membawa keuntungan tersendiri dalam menyokong perekonomian daerahnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2016 sebesar Rp 628.394,16 milyar yang tergolong mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor pertanian sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai (21,65%). Selanjutnya sektor industri pengolahan (19,98%), sektor perdagangan (17,89%), sektor konstruksi (13,40%) dan sektor-sektor lain memberikan total kontribusi sebesar 27,08% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor tersebut menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. (BPS Provinsi Sumatera Utara).

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara juga dipengaruhi oleh Dana Desa yang ditransfer pemerintah pusat ke-daerah. Sumatera Utara termasuk provinsi dengan anggaran dana desa terbesar diantara provinsi lainnya. Berikut jumlah anggaran dana desa di Provinsi Sumatera Utara;

Anggaran Dana Desa Provinsi Sumatera Utara 2015-2020 (Triliun)

Dana Desa Provinsi Sumut 2015-2020 (Triliun)



Gambar 1.7 Anggaran Dana Desa Sumatera Utara

Sumber : Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Pada tahun 2015 Anggaran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,46 triliun. Pada tahun 2016 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 3,29 triliun naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp 4,19 triliun untuk dana desa. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 anggaran untuk dana desa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 3,87 triliun. Tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 4,45 triliun. Kemudian pada tahun 2020 anggaran dana desa meningkat kembali sebesar Rp 4,50 triliun.

Setelah jumlah besarnya Anggaran Dana Desa pada Provinsi Sumatera Utara terdapat juga Anggaran Dana Desa setiap Kabupaten atau Kota provinsi Sumatera Utara. Berikut ini perkembangan anggaran dana desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun
2018 - 2021

Wilayah	Jumlah Desa	Anggaran Dana Desa (Miliar)			
		2018	2019	2020	2021
Kab. Asahan	204	126.570.894.000	146.090.415.000	150.506.325.000	152.083.710.000
Kab. Dairi	169	111.910.524.000	127.172.564.000	130.304.470.000	129.738.730.000
Kab. Deli Serdang	394	271.906.373.000	306.386.948.000	312.277.329.000	312.546.966.000
Kab. Karo	269	173.021.882.000	197.078.926.000	201.208.286.000	198.409.273.000
Kab. LabuhanBatu	98	60.371.923.000	70.226.102.000	72.182.696.000	74.477.417.000
Kab. Labuhanbatu Selatan	73	46.205.735.000	61.548.371.000	65.076.224.000	67.788.110.000
Kab. Labuhanbatu Utara	90	68.036.521.000	79.123.527.000	83.576.158.000	86.022.841.000
Kab. Langkat	277	178.799.190.000	205.446.268.000	211.213.256.000	213.259.749.000
Kab. Mandailing Natal	407	252.910.057.000	285.841.420.000	290.920.103.000	286.845.864.000
Kab. Nias	170	148.261.931.000	180.585.127.000	181.381.215.000	179.544.025.000
Kab. Nias Utara	113	110.728.446.000	137.008.319.000	137.596.573.000	136.386.189.000
Kab. Nias Selatan	461	314.481.751.000	348.422.333.000	356.099.164.000	351.138.751.000
Kab. Nias Barat	105	92.269.401.000	114.000.248.000	118.531.988.000	117.397.253.000
Kab. Simalungun	413	259.232.136.000	294.442.204.000	298.689.733.000	296.800.840.000
Kab. Tapanuli Selatan	248	145.856.856.000	167.751.279.000	172.034.790.000	169.754.513.000
Kab. Tapanuli Tengah	215	121.058.197.000	140.541.973.000	144.349.335.000	142.631.022.000
Kab. Tapanuli Utara	252	164.129.846.000	184.186.164.000	194.621.304.000	192.016.817.000
Kab. Toba Samosir	244	154.311.189.000	176.101.238.000	179.571.269.000	177.074.852.000
Kab. Pakpak Bharat	52	40.948.983.000	48.298.630.000	50.424.120.000	50.970.983.000
Kab. Humbang Hasundutan	154	105.690.046.000	123.336.297.000	126.028.454.000	124.934.505.000
Kab. Serdang Bedagai	243	162.911.520.000	184.774.302.000	187.834.594.000	185.739.448.000
Kab. Samosir	134	90.921.937.000	108.744.499.000	109.313.044.000	107.929.748.000
Kab. Batu Bara	151	104.583.228.000	118.843.171.000	121.634.028.000	121.071.737.000
Kab. Padang Lawas	304	204.748.115.000	230.097.858.000	233.549.721.000	230.275.200.000

Kab. Padang Lawas Utara	388	254.318.741.000	287.244.660.000	293.516.929.000	289.345.427.000
Kota Gunungsitoli	101	77.009.849.000	89.077.769.000	90.367.394.000	89.308.308.000
Kota Padang Sidempuan	79	33.662.556.000	39.678.754.000	41.319.568.000	41.800.048.000
Total	5.808	3.874.857.827.000	4.452.049.366.000	4.554.128.070.000	4.525.292.326.000

Sumber : Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Tabel diatas menunjukkan jumlah anggaran Dana Desa setiap Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai 2021. Rata-rata disetiap Kabupaten mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, ini disebabkan oleh tujuan dari pemerintah Indonesia untuk membngun Indonesia dari pinggiran yang bertujuan untuk kesejahteraan. Anggaran Dana Desa terbesar terdapat pada kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp 351.138.751.000 dengan jumlah Desa sebanyak 461 Desa . Sedangkan anggaran yang terendah yaitu Kota Padang Sidempuan sebesar Rp 41.800.048.000 dengan jumlah desa sebanyak 79 desa. Total dari Anggaran Dana Desa 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 yaitu sebesar Rp 4,526 Triliun. Disamping itu Kabupaten Asahan dapat dikatakan Kabupaten dengan anggaran dana desa sedang melihat jumlah desanya sebanyak 204 Desa dengan anggaran yang setiap tahunnya mengalami peningkatan serta sangat berpengaruh terhadap perkembangan desa tersebut baik dari segi ekonomi, pendidikan, kemandirian masyarakat dan lain sebagainya.

Kabupaten Asahan berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Terletak pada garis 2°30'00"-3°10'00" Lintang Utara, 99°01'-100°00' Bujur Timur dengan ketinggian 0–1.000 m diatas permukaan laut. Kabupaten Asahan menempati area seluas 3.732,97 km² yang terdiri dari 25 Kecamatan, 204

Desa/Kelurahan Definitif. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan Kecamatan yang terluas, dengan luasnya sebesar 713,63 km² atau sekitar 19,11 % dari total luas Asahan, diikuti Kecamatan Sei Kepayang dengan luas 370,69 km² atau 9,93 %. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Kisaran Timur dengan luas 30,16 km² atau sekitar 0,80% dari total luas wilayah Kabupaten Asahan. Sejak dimulainya program Dana Desa, pemerintah dan masyarakat mengutarakan begitu banyak harapan yang di antaranya adalah untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat serta untuk membangun infrastruktur dan sektor padat karya yang bisa langsung berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Anggaran Dana Desa Kabupaten Asahan Tahun 2018-2021 (Miliar)



Gambar 1.8 Anggaran Dana Desa Kabupaten Asahan

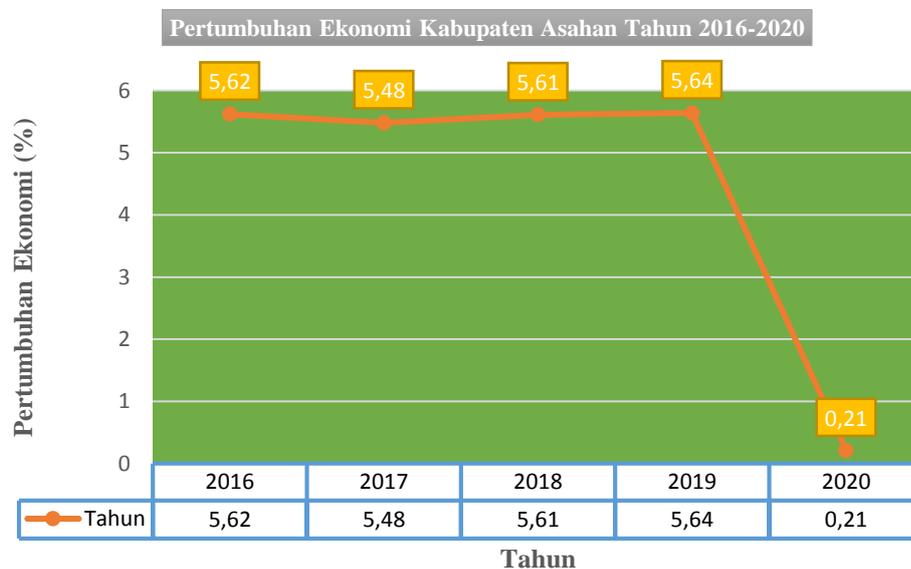
Sumber : Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Pada grafik diatas menunjukkan Anggaran Dana Desa Kabupaten Asahan tahun 2018 sampai 2021. Pada tahun 2018 Anggaran dana desa kabupaten Asahan sebesar Rp. 126,21 miliar. Tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan sebesar

Rp. 146.09 miliar naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 sebesar Rp. 150,5 miliar untuk dana desa angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021 anggaran untuk dana desa kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 152,08 miliar. Jika dilihat anggaran dana desa kabupaten Asahan setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini disebabkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat yang terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Asahan merupakan daerah yang cukup luas di Provinsi Sumatera Utara, serta dengan potensi kekayaan sumberdaya yang melimpah, yakni daerah lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Melihat kekayaan sumber daya alam yang melimpah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonominya.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020



Gambar 1.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asahan

Sumber : Badan Pusat Statistik kabupaten Asahan 2020 (www.asahankab.bps.go.id)

Pada gambar di atas, pertumbuhan ekonomi kabupaten asahan pada tahun 2016 sampai 2020. Pertumbuhan ekonomi asahan pada tahun 2016 5,62%. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi 5,48% mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya. Tahun 2018 5,61%, naik dari tahun lalu, peningkatan tersebut dicapai karena lapangan usaha informasi dan komunikasi meningkat. Di tahun 2019 meningkat lagi sebesar 5,64%, tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat drasis yaitu sebesar 0,21% akibat pandemi covid-19.

Kecamatan Bandar Pasir Mandoge adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Asahan. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge terdiri dari 9 (sembilan) Desa dan memiliki luas 713,6321 km² atau sekitar 19,11 persen dari total luas Kabupaten Asahan menjadi kecamatan terluas dikabupaten asahan. Berikut anggaran Dana Desa diKecamatan Bandar Pasir Mandoge;

Tabel 1.2

Anggaran Dana Desa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tahun 2021

Desa	Anggaran Dana Desa 2021
Bandar Pasir Mandoge	Rp 814.040.000
Gotting Sidodadi	Rp 791.677.000
Huta Bagasan	Rp 1.022.331.000
Huta Padang	Rp 998.352.000
Sei Kopas	Rp 827.413.000
Sei Nadoras	Rp 815.429.000
Silau Jawa	Rp 761.026.000
Suka Makmur	Rp 750.859.000
Tomuan Holbung	Rp 822.521.000
Total	Rp 7.603.648.000

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dana Desa Kabupaten Asahan (www.dinaspmmd.asahankab.go.id)

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge terdiri dari 9 Desa. Pada anggaran Dana Desa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge totalnya mencapai Rp 7.603.648.000. Desa Bandar Pasir Mandoge sebesar Rp 814.040.000,

desa Gotting Sidodadi sebesar Rp 791.677.000, desa Huta Bagasan sebesar Rp 1.022.331.000, desa Huta Padang Rp 998.352.000, desa Sei Kopas Rp 827.413.000, desa Sei Nadoras Rp 815.429.000, desa Silau Jawa Rp 761.026.000, desa Suka Makmur Rp 750.859.000, desa Tomuan Holbung Rp 822.521.000. Desa dengan anggaran terbesar adalah Desa Huta Bagasan dengan jumlah mencapai 1 Milyar lebih sedangkan desa dengan anggaran terendah adalah Desa Suka Makmur dengan jumlah 750 jutaan.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19, dapat dilihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192). Peraturan tersebut menyatakan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi dana atau pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Hal tersebut diiringi juga dengan

peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk (1) Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (2) Padat Karya Tunai Desa (PKTD). (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Diharapkan upaya yang dilakukan pemerintah berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia dan pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh membaik.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang berkenaan dengan kebijakan Transfer Payment pada Dana Desa dalam mewujudkan stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan melihat apakah dengan adanya kebijakan Transfer Payment pada Dana Desa dapat menstabilkan ekonomi desa dalam mendukung kualitas hidup masyarakat desa. Untuk itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Kebijakan Transfer Payment pada Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus ; Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka didapat beberapa permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yaitu:

1. Pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak serius pada sektor ekonomi, tercatat pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
2. Pelaksanaan anggaran Dana Desa yang besar tersebut masih menghadapi kendala. Masih rendahnya aparatur Pemerintah Daerah dan Desa untuk mengelola penggunaan Dana Desa dan tidak adanya Pengawasan dalam proses penyaluran Dana Desa.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan pemerintahan Desa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam proses penyalurannya.
4. Kurangnya transparansi (keterbukaan) pemerintah desa terhadap masyarakat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa sehingga masih belum optimal berdasarkan asas pengelolaan keuangan.

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, untuk dapat membuat penelitian ini lebih terfokus, terarah, tidak meluas maka peneliti fokus membatasi masalah pada evaluasi Dana Desa melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah ada sebelumnya, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan transfer payment pemerintah pada masa sebelum dan semasa pandemi covid-19 ?
2. Bagaimana perkembangan Dana Desa pada program bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) dan padat karya tunai desa (PKTD) di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan analisa ekonomi deskriptif tentang perkembangan pengeluaran pemerintah pada subsidi.
2. Melakukan analisa dan evaluasi keluarga penerima manfaat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan dunia ilmu ekonomi maupun kalangan masyarakat umum. Manfaat yang dapat diambil diantaranya :

1.5.1 Manfaat Akademik

- a. Bagi Peneliti :

(1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.

(2) Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

b. Bagi mahasiswa :

(1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.

(2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

1.5.2 Manfaat Non-akademik

a. Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah.

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (income per capita) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (gross national income- GNI) per kapita “riil” (pertumbuhan moneter dari GNI per kapita dikurangi tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan- seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro & Smith, 2011).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap- sikap masyarakat, dan institusi – institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Pengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, pada saat negara-negara berkembang mencapai target pertumbuhan ekonomi namun tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidak berubah, menunjukkan bahwa ada yang sangat salah dengan pengertian pembangunan yang sempit itu. Kini semakin banyak ekonom dan pembuat kebijakan yang

menyuarakan perlunya upaya serius untuk menanggulangi meluasnya kemiskinan absolut, distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, dan meningkatnya pengangguran. Singkatnya, dalam dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi mulai didefinisi ulang dalam kaitannya dengan upaya pengurangan atau peniadaan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks perekonomian yang semakin berkembang (Todaro dan Smith, 2011:17).

Oleh sebab itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem itu. Pembangunan seharusnya upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro dan Smith, 2011:18-19).

Terdapat tiga komponen dasar ataupun nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang sesungguhnya. Tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti pembangunan tersebut ialah (Todaro dan Smith, 2011:25-26):

- a. Kecukupan (*sustenance*) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Semua orang memiliki kebutuhan dasar tertentu yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan. Kebutuhan dasar manusia untuk menopang kehidupannya ini mencakup makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan

perlindungan. Jika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi atau persediaannya tidak memadai, akan terjadi suatu kondisi “keterbelakangan absolut”.

- b. Harga diri (*self-esteem*) : Menjadi manusia seutuhnya. Komponen universal kedua bagi adanya kehidupan yang baik adalah harga diri, yaitu suatu perasaan berharga dan bermartabat, tidak diperalat untuk mencapai tujuan orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Denis Goulet, “Pembangunan telah dilegitimasi sebagai tujuan karena merupakan hal yang penting, bahkan mungkin merupakan cara yang sangat berharga untuk meraih harga diri.”
- c. Kebebasan (*freedom*) : kemampuan untuk memilih. Nilai ketiga dan terakhir yang perlu tercakup dalam makna pembangunan adalah konsep kebebasan manusia. Pengertian kebebasan di sini harus dipahami dalam kaitannya dengan kebebasan dari kondisi kekurangan persyaratan hidup yang bersifat material serta kebebasan dari penghambaan sosial terhadap lingkungan, orang lain, penderitaan, lembaga yang represif, dan keyakinan dogmatis, khususnya yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah nasib yang sudah ditakdirkan Tuhan.

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan, salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga

dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercapai (Jhingan, 2010).

2.1.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

a. Hukum Alam

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional.

b. Pembagian kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan: (1) meningkatnya keterampilan pekerja; (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

c. Proses pemupukan modal

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan.” Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga-dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat

investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

2. David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*. Buku ini diterbitkan 1917. Edisi ketiga 1921 serta korespondensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lainlah yang menurut ide-ide Ricardo yang menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satu pun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi. Oleh sebab itu analisa Ricardo merupakan analisa yang memutar.

Asumsi teori Ricardo Teori-teori Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa:

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri;
2. “law of diminishing return” berlaku bagi tanah;
3. Persediaan tanah adalah tetap;
4. Permintaan akan gandum benar-benar inelastis;
5. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel;
6. Keadaan pengetahuan teknik adalah tertentu (*given*);
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal;
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap;

9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal; dan bahwa baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja;
10. Terdapat persaingan yang sempurna;
11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan;

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan. Sementara Ricardo sendiri menulis dalam pendahuluan bukunya, “Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisasi, dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan.” Keseluruhan pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah. (Jhingan, 2010).

2.1.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang menalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula

mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (human capital). (Todaro & Smith, 2011)

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan structural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2011)

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualism ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan

pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2011).

2.1.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum *law of diminishing return*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian,

nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan *output* yang diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk *horizontal*. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

2.1.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi Fei-Ranis

Teori pembangunan ekonomi Fei-Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumberdaya, dimana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah

pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonomi pertaniannya berhenti. Kebanyakan orang bergerak di lapangan pertanian tradisional. Bidang- bidang nonpertanian memang ada, tetapi begitu banyak mempergunakan modal. Disitu juga ada sektor industri yang aktif dan dinamis. Pembangunan terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian, yang sumbangannya terhadap *output* adalah nol atau dapat diabaikan, ke sektor industri di mana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah di bidang pertanian.

Asumsi di dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Fei dan Ranis membuat asumsi berikut :

1. Ada ekonomi dua-muka yang terbagi dalam sektor pertanian tradisional yang mandeg, dan sektor industri yang aktif;
2. *Output* sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh aja;
3. Di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali (reklamasi);
4. Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap;
5. Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (*return to scale*) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel;
6. Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol;
Jika penduduk melampaui jumlah di mana produktivitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi keluaran (*output*) pertanian.
7. *Output* sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh aja;
8. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen;

9. Upaya nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian;
10. Pekerja di masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk produk pertanian;

Berdasarkan asumsi ini, Fei dan Ranis menelaah pembangunan ekonomi surplus-buruh menjadi tiga tahap. Pada *tahap pertama*, para penganggur tersamar yang tidak menambah *output* pertanian, dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Pada *tahap kedua*, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian tetapi memproduksi lebih kecil daripada upah institusional yang mereka peroleh. Ini mengawali *tahap ketiga*, yang menandai akhir tahap tinggal landas dan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar daripada perolehan upah institusional. Di dalam tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dan sektor pertanian berangkat menjadi komersial.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hollis B. Chenery (Todaro & Smith, 2011), Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi,

perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Teori Pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam bukunya berjudul *An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation* ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total.

a. Pertumbuhan output

Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu :

- 1) Sumber daya alam
- 2) Sumber daya manusia
- 3) Stok kapital yang tersedia

Sumber-sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang

tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maka pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa ditingkatkan. Selanjutnya unsur jumlah penduduk dan stok kapital menentukan besarnya output masyarakat dari tahun ke tahun. Tetapi apabila output terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan (dieksploitasi) hingga batas ketersediaannya. Tingkat ketersediaan sumber daya alam ini akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian.

Unsur yang kedua adalah sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan output, unsur ini dianggap mempunyai peranan pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya apabila stok kapital yang tersedia membutuhkan pekerja 1 juta orang untuk menggunakannya, sementara jumlah tenaga kerja yang tersedia hanya 900 ribu orang maka jumlah penduduk yang akan menempati pekerjaan itu akan cenderung meningkat sehingga tenaga kerja yang tersedia akhirnya akan mencapai 1 juta orang.

Unsur produksi yang ketiga yaitu stok kapital, yang secara aktif menentukan output. Smith memang memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan *output*. Apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital. Di samping itu laju pertumbuhan *output* juga tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital. Pertumbuhan

itu akan terus melaju hingga akan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam dan dukungan sumber daya manusia yang terampil.

b. Pertumbuhan penduduk

Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2006).

2. David Ricardo

Menurut Ricardo, proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Kesimpulan umumnya juga masih tetap sama yaitu bahwa dalam perpacuan tersebut penduduklah yang akhirnya mencapai posisi stasioner. Seperti juga dengan Adam Smith, Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (yaitu, sumber-sumber alam) tidak dapat bertambah sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Perbedaan terutama terletak pada penggunaan alat analisis mengenai distribusi pendapatan (berdasarkan teori Ricardo yang terkenal itu) dalam penjabaran mekanisme pertumbuhan dan pengungkapan peranan yang lebih jelas dari sektor pertanian di antara sektor-sektor lain dalam proses pertumbuhan. (Mudrajad Kuncoro, 2000).

Proses pertumbuhan yang digambarkan Ricardo ditandai dengan ciri- ciri sebagai berikut :

- a. Terbatasnya jumlah tanah, yang sangat susah untuk diperluas, sebagai faktor produksi.
- b. Peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja (penduduk) sesuai dengan tingkat upah yaitu apakah di atas atau di bawah tingkat upah minimal, yang oleh Ricardo disebut tingkat upah alamiah (*natural wage*).
- c. Akumulasi kapital terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi meningkat.
- d. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi.
- e. Masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan.

3. Thomas Robert Malthus

Dalam pandangan mazhab Klasik mengenai perkembangan ekonomi secara umum, nampak adanya pengaruh dari gagasan Malthus tentang signifikansi masalah pertambahan penduduk terhadap perkembangan ekonomi. Dengan demikian maka hal ini perlu diperhatikan karena masalah penduduk mempunyai arti dan relevansi terhadap perkembangan ekonomi. Menurut Malthus secara alamiah populasi akan terus mengalami peningkatan lebih cepat daripada suplai makanan. Produksi makanan per kapita, tentu saja akan mengalami penurunan, sementara populasi mengalami kenaikan. Malthus berpendapat bahwa tidak menjadi jaminan kalau pertambahan penduduk secara kuantitatif akan berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan. Malthus membeberkan sejumlah faktor kendala terhadap kelangsungan pertumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk

secara kuantitatif sekali-kali tidak menjadi jaminan bahwa pendapatan riilnya juga akan meningkat dengan sepadan. Pertambahan penduduk hanya mendukung pertumbuhan terhadap tata susunan ekonomi, apabila perkembangan ekonomi dapat meningkatkan daya beli real (permintaan efektif) secara menyeluruh. Barulah, dalam keadaan demikian maka akan terlaksana akumulasi modal sebagai ciri pokok dalam proses pertumbuhan, sekaligus juga akan menimbulkan permintaan akan tenaga kerja. Kendala terhadap perkembangan tersebut oleh Malthus diungkapkan dalam teorinya mengenai ketidakmampuan untuk berkonsumsi secara memadai (*theory of underconsumption*). (Boediono, 2009).

Masalah penting dalam pembahasan Malthus yang menarik perhatian dan sampai sekarang masih relevan bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang ialah segi institusi yang bersifat sosiologis- ekonomis. Dalam masyarakat di negara-negara maju, termasuk di kalangan cendekiawan, sering terdapat pandangan seolah-olah keterbelakangan dan kemacetan ekonomi di belahan dunia lain (Amerika Latin, Afrika, Asia) disebabkan oleh tabiat dan perilaku penduduk setempat, yaitu sikap memudahkan sesuatu, malas dan mempunyai ketergantungan pada alam yang sangat tinggi, keadaan sumber daya alam yang sangat menguntungkan dan memudahkan kehidupan manusia. (Boediono, 2009).

Pandangan yang dangkal tetapi populer itu kebenarannya dibantah oleh Malthus. Malthus menunjuk kepada kenyataan institusional dalam tata susunan ekonomi masyarakat yang menjadi kendala besar bagi kemajuan rakyat. Keterbelakangan dan kemiskinan penduduk di negara-negara yang dimaksud bukanlah disebabkan oleh terbatasnya tanah subur atau semakin kecilnya luas

tanah karena penduduk bertambah; bukan pula oleh “kemalasan” penduduk. Kemiskinan itu ada sangkut-pautnya dengan kenyataan bahwa tanah yang sangat luas dikuasai oleh segelintir kalangan atas dalam masyarakat yang terdiri dari sejumlah keluarga tuan tanah. Konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah serupa itu tidak memberikan dorongan dan sama sekali tidak mengandung perangsang bagi petani penggarap tanah untuk mencari kemajuan dengan cara meningkatkan hasil produksinya, apalagi dengan cara melakukan investasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar hasil produksi tanah dinikmati oleh tuan tanah, sedangkan hasil produksi masyarakat kecil (golongan lemah) lebih diperuntukkan buat pemenuhan kebutuhan dasar dan hanya sebagian kecil yang diinvestasikan. (Boediono, 2009).

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Karl Max

Pola pendekatan dinamika (*pattern of dynamic approach*) yang menyangkut perkembangan masyarakat secara menyeluruh dalam jangka panjang, bukanlah cara pandang yang baru timbul di zaman modern. Haluan pemikiran tersebut telah terkandung di dalam gagasan-gagasan para pakar teori klasik. Pola pendekatan demikian lebih menonjol lagi dalam sistem pemikiran Karl Marx, yang dapat dianggap sebagai teori dinamika yang paling komprehensif. Dalam hubungan itu, pandangan para pakar teori klasik dan Karl Marx dapat dimasukkan dalam kategori *grand theories* dan kadang – kadang sebagai *magnificent dynamics*. Karl Marx menyoroti banyak aspek dalam teorinya yang terkenal sebagai teori konflik. Dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, Marx menonjolkan pendeskripsian tentang perkembangan masyarakat dari polanya yang sederhana

hingga menjadi masyarakat yang berstruktur kompleks dan dengan pembagian kerja yang ketat dalam masyarakat kapitalis. (Boediono, 2009).

Dalam gagasannya mengenai konsep materialisme historis, Marx mengungkapkan bahwa aktivitas produktif manusia merupakan kunci untuk menganalisis kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi substansi masyarakat kapitalis, yaitu bahwa seluruh masyarakat harus membuat diri mereka produktif dari tahun ke tahun. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat terikat dalam produksi yang bersifat materi. Para kapitalis merupakan pihak yang memiliki posisi tawar tertinggi, sedangkan kaum buruh hanya dapat menjual tenaganya kepada majikan sebagai satu input dalam proses produksi. Maka, terjadilah eksploitasi besar-besaran terhadap kaum buruh. Pada masa itu modal merupakan kunci untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Sejalan dengan perkembangan teknologi, para pengusaha yang menguasai faktor produksi akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan menginvestasikan akumulasi modal yang diperolehnya. Menurut Marx, kemampuan kapitalis untuk mengakumulasi modal terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dipekerjakannya. Nilai buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah merupakan manifestasi dari jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut. (Boediono, 2009).

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Perapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang

dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk konsumsi. Yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembatani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut teijembatani. Jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagian besar akan tergantung pada investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dan modal merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bilamana harapan laba tinggi, pengusaha menginvestasi lebih besar. Suku bunga, yang merupakan faktor lainnya dari investasi, tergantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan untuk mengkonsumsi turun.

Sebaliknya kecenderungan berkonsumsi dapat mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan kenaikan pada investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan. Dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan

berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung menggumpal (*kumulatif*). Akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi. (Jhingan, 2010).

Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier K. Pengali (multiplier) ini memperlihatkan hubungan yang tepat, berkat adanya kecenderungan berkonsumsi tersebut, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Ini berarti, bila investasi agregat naik, pendapatan akan meningkat, yang besarnya adalah K kali kenaikan investasi tersebut. Rumusnya ialah $\Delta Y = K\Delta I$, dan $1-1/K$ mewakili kecenderungan marginal mengkonsumsi. Jadi pengali $K = 1/1-MPC$. Karena kecenderungan marginal berkonsumsi turun, berkat adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan dosis besar guna memperoleh tingkat pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian. Inilah secara singkat teori Keynes mengenai pekerjaan. (Jhingan, 2010).

Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam "*General Theory*"-nya. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrod, Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam karangannya yang berjudul "*Economic Possibilities for Our Grand Children*" Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu (i) kemampuan kita mengendalikan penduduk; (ii) kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil; (iii) kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan, mempedomani hal-hal yang benar-benar

sesuai dengan ilmu pengetahuan; dan (iv) tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Sejahtera menyangkut kekhawatiran akan masa depan kapitalisme, Keynes bersifat optimis Keynes menganggap kapitalisme sebagai suatu mekanisme yang mempunyai kekenyalan dan daya adaptasi yang besar dalam membentuk dirinya sendiri menurut keadaan. Keynes membangun teori kebangkrutan kapitalisnya (stagnasi jangka panjang) berdasarkan over-produksi umum, konsumsi rendah yang kronis dan merosotnya efisiensi marginal modal di masa depan. (Jhingan, 2010).

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

1. W.W. Rostow

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh W.W. Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* pada Maret 1956 berjudul *The Take- Off Into Self-Sustained Growth* pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelusuri dari aspek sejarah pertumbuhannya hanya dalam tiga tahap: tahap prekondisi tinggal landas (yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus. (Boediono, 2009)

Rostow pulalah yang membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminologi '*less developed*', untuk menyebut kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminologi '*more developed*' untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan sektor kapitalis modern.

Dalam hal prakondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses di mana masyarakat berkembang dari suatu tahap ke tahap yang lain. Tahap- tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel – variabel kritis atau strategis yang dianggap mengangkat kondisi-kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi menuju tahapan baru yang berkualitas. Teori ini secara mendasar bersifat *unilinear* dan *universal*, serta dianggap bersifat permanen.

Sebagai bagian teori modernisasi, teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan Barat. Para pakar ekonomi menganggap bahwa teori pertumbuhan ekonomi ini merupakan contoh terbaik dari apa yang diistilahkan sebagai ‘teori modernisasi’. (Kuncoro M. , 2000).

Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap :

1. Masyarakat tradisional (*The Traditional Society*)
2. Masyarakat Pra-kondisi untuk Periode Lepas Landas (*The Preconditions for Take Off*)
3. Proses Lepas landas (*The Take Off*)
4. Gerak Menuju Kedewasaan (*Maturity*)
5. Tingkat Konsumsi Tinggi (*High Mass Consumption*)

2. Harrod – Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil

yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod- Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod- Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). (Boediono, 2009).

Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

- a. Perkonomian bersifat tertutup
- b. Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan
- c. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).
- d. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y = C + I$).

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = K = n \dots\dots\dots(2-1)$$

Dimana : $g = Growth$ (tingkat pertumbuhan output)

$K = \text{Capital}$ (tingkat pertumbuhan modal)

$n =$ Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

2.1.2.4. Produk Domestik Bruto (PDB)

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai perekonomian sedang berlangsung baik atau buruk. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB) / *Gross Domestic Product* (GDP).

Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (*final*) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Dalam *Gross Domestic Product* (GDP) terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan.⁴⁶ Selain itu, *Gross Domestic Product* (GDP) juga mengukur dua hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian (Mankiw, 2007).

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDB yaitu (Case & Fair, 2008):

a. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam memproduksi barang akhir.

b. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada semua barang akhir selama satu periode tertentu.

c. Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi adalah metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik orang luar negeri atau warga negara itu sendiri.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu teori makro dan teori mikro.

2.1.3.1 Teori makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah.

Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono,2009).

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus

menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat. (Mangkoesobroto, 2001).

2. Teori Adolf Wagner

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. (Mangkoesobroto, 2001).

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya

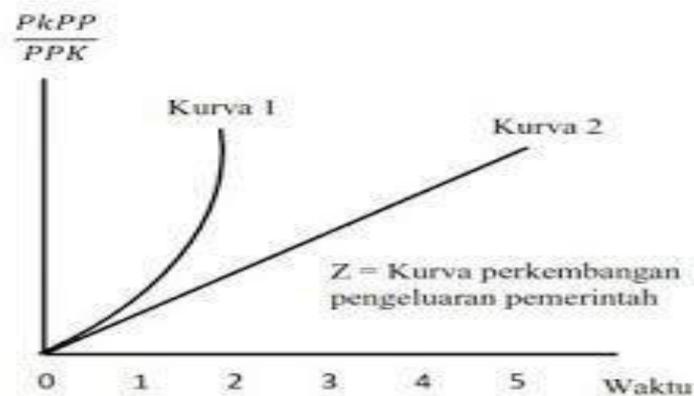
$$\frac{PPkP}{PPk1} < \frac{PkPPn}{PPk2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPkn}$$

fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

Dimana : $PPkP$: Pengeluaran pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan perkapita (GDP/jumlah penduduk)

1,2,...n : jangka waktu (tahun)



Gambar 2. 1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Sumber : Mangkoesobroto, 2001

Kurva diatas menunjukkan secara relative peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wager mendasarkan pandanganya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organisasi yang mengagap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

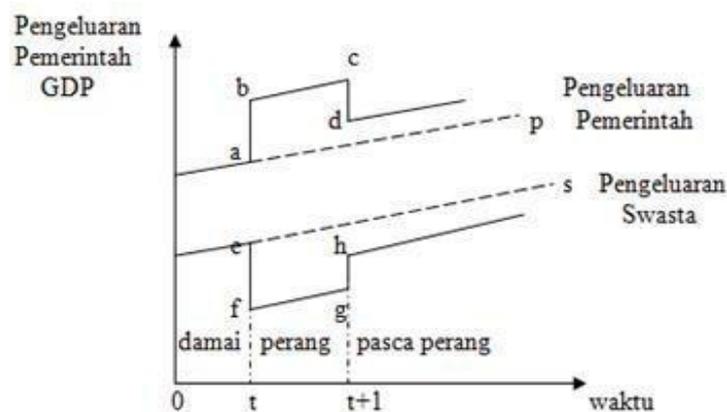
3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal

meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini :

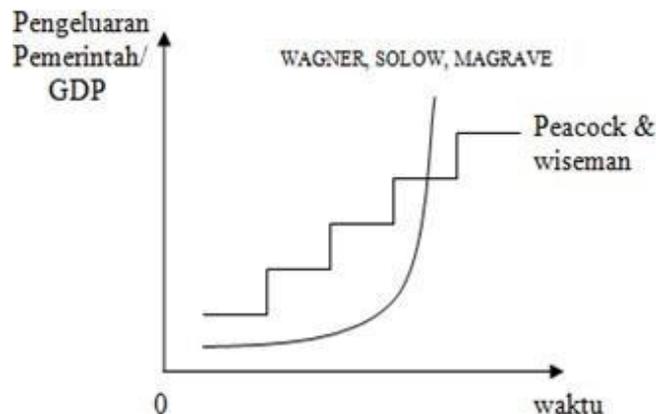


Gambar 2.2 Kurva Peacock dan Wiseman

Sumber : Mangkoesobroto, 2001

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Gambar 2.3 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave

Sumber : Mangkoesobroto, 2001

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan

pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

2.1.3.2 Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. (Mangkoedobroto : 2001). Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Penentuan Permintaan

$$U^i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana :

$$U_i = f(G, X)$$

G = vektor dari barang publik

X = vektor barang swasta

i = individu; = 1, ..., m

U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk

menghasilkan i barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

b. Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana :

- U_p = fungsi utilitas
- S = keuntungan yang diperoleh politisi
- G = Vektor barang publik
- X = Vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-4)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P_x X + t B < M_i \dots \dots \dots (2-5)$$

Dimana :

- P = Vektor harga barang swasta
- X = Vektor barang swasta
- B_i = Basis pajak individu 1
- M_i = Total pendapatan individu 1

T = Tarif Pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*Price Taker*) atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

2.1.4 Kebijakan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kab/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. (www.kemendes.go.id).

2.1.4.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh Pemda

diteruskan ke masing - masing Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan;
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima :

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD;
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50%. Capaian *output* paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

2.1.4.2 Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

a. Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

b. Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

c. Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

d. Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

e. Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (www.kemendes.go.id).

2.1.4.3 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Sesuai dengan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat, kemudian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai ialah keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi syarat yaitu tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja, mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Mekanisme pendataan : (1) pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan covid-19 dengan formulir terlampir, (2) basis pendataan di RT dan RW, (3) musyawarah desa khusus yang dilaksanakan dengan agenda tunggal : validasi, finalisasi, dan penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa, (4) legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa, (5) pengesahan oleh Bupati/Walikota atau dapat diwakilkan ke Camat dalam waktu selambat-lambatnya lima hari kerja pertanggal diterima. Metode

perhitungan penyaluran : (1) Desa penerima Dana Desa < 800 juta mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal 25% (2) Desa penerima Dana Desa 800 juta sampai 1,2 miliar mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal 30% (3) Desa penerima Dana Desa > 1,2 miliar mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal 35%.

2.1.4.4 Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Menyusul Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini evaluasi desa tanggap COVID-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kriteria pelaksanaan padat karya tunai desa ; (1) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya. (2) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD. (3) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari. (4) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD. (www.kemendes.go.id)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

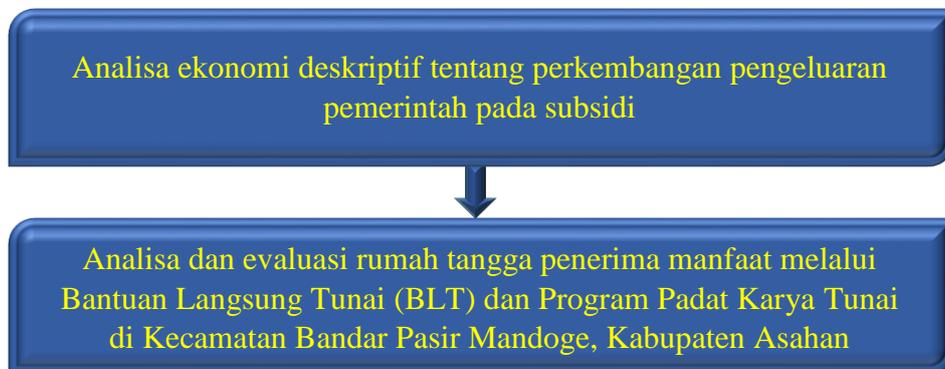
No	Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Siti Muslihah, Hilda Octaviana Siregar, Sriniyati (2019), Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta	Metode Kuantitatif	Dana Desa, pembangunan Fisik, Kesejahteraan Masyarakat	Dana desa memberikan dampak terhadap pembangunan fisik, Dana desa memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
2.	Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, dan Annisa Nur Salam (2021), Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan	Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif	Dana Desa, Pemerintahan Desa, Kemasyarakatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BLT Dana Desa tahap pertama secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik yang mana masyarakat penerima bantuan sudah mendapatkan BLT Dana Desa, meskipun demikian implementasi kebijakan BLT Dana Desa masih memunculkan masalah selama proses pelaksanaannya.

3	Dianti lalira, Amran T. Nakoko, Ita Pingkan F. Rorong (2018), Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud	Data Panel	Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Tingkat Kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan, Alokasi Dana Desa tidak signifikan secara statistik, terhadap tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
---	--	------------	--	---

2.3 Tahapan Penelitian

Secara umum, Adapun kerangka penelitian berdasarkan pada Kebijakan Transfer Payment pada Dana Desa dalam mempengaruhi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa.

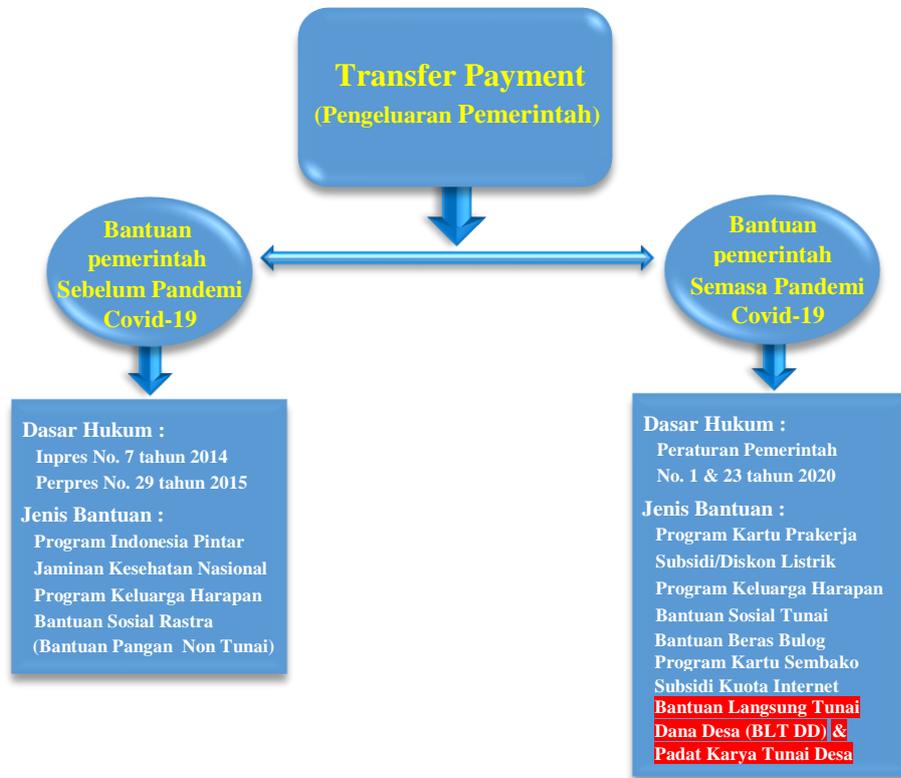
2.3.1 Kerangka Analisis Penelitian



Gambar 2.4 Kerangka Analisis Penelitian

2.3.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual Transfer Payment



Gambar 2.5 Bagan Konseptual

Kerangka Konseptual Dana Desa



Gambar 2.6 Bagan Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Mudrajad Kuncoro (2013:198) menyimpulkan analisis deskriptif salah satu bentuk analisis adalah kegiatan menyimpulkan data mentah dan jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Mengelompokkan atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data, juga merupakan salah satu bentuk analisis untuk menjadikan data mudah dikelola.

Secara lebih spesifik, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis kebijakan Transfer Payment pada Dana Desa melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah: Transfer

Payment, Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (Cash for Work).

Tabel 3.1

Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasioanl	Sumber Data
Transfer Payment (Pengeluaran Pemerintah)	Alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya ke berbagai sektor	Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id
Dana Desa	Dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pembangunan desa dalam satuan milyar rupiah	Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi www.kemendes.go.id
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa	Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id Observasi Lapangan Kantor Desa
Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan pendapatan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat	Observasi Lapangan Kantor Desa

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini di rencanakan selama 4 bulan yaitu Mei sampai Agustus 2021.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data ini menggunakan kata-kata dan angka untuk menggambarkan fenomena yang diamati. Dan data kuantitatif berguna menambah data-data pendukung dalam penelitian ini.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari *website-website* resmi, seperti Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendesa PDTT RI), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI), dan menggunakan data dari berbagai sumber yang terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Henke & Reitsh (Kuncoro, 2013) pengumpulan data umumnya berasal dari Data *internal* atau *eksternal* dan Data primer atau data sekunder. Data

internal berasal dari organisasi tersebut ataupun dari *eksternal* yang berasal dari luar organisasi. Sedangkan, data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Di lain pihak, data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. (Kuncoro, 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data yang berkaitan dengan Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendesa PDTT RI), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI). Kemudian Penelitian kepustakaan (*library research*) juga dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat menunjang dan dapat digunakan sebagai tolak ukur pada penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji literatur-literatur yang tersedia seperti buku, jurnal dan melakukan observasi lapangan, serta teknik dengan membagikan kuesioner dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan kepada pemerintahan desa dan responden secara langsung.

3.6 Populasi dan Sampel

3.6.1 Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. (Kuncoro, 2013). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana

Desa dan Padat Karya Tunai Desa di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

3.6.2 Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah *Probability sampling*, pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (daerah) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi, *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random* dan *area (cluster) sampling*. Karena obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, maka penelitian menggunakan teknik *area (cluster) sampling*. Analisis *cluster* adalah istilah yang diberikan pada sebuah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi objek atau individu yang serupa dengan memperhatikan beberapa kriteria. Tujuan utama analisis *cluster* adalah untuk menggolongkan individu atau objek yang berhubungan secara *mutually exclusive* ke dalam jumlah yang lebih kecil. (Kuncoro, 2013)

Berdasarkan jumlah desa di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan yaitu berjumlah 9 desa meliputi : Desa Bandar Pasir Mandoge, Huta Bagasan, Huta Padang, Gotting Sidodadi, Sei Kopas, Sei Nadoras, Silau Jawa, Suka Makmur, dan Tomuan Holbung. Dari 9 (sembilan) desa tersebut penulis memilih 3 (tiga) desa secara acak/area yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Desa yang dipilih yaitu : Desa Bandar Pasir Mandoge, Desa Suka Makmur, Desa Huta Padang. Alasan diambilnya ketiga desa tersebut; Pertama, Aktivitas perekonomian didesa tersebut tinggi karena dekat dengan pusat kecamatan. Kedua, Desa Bandar Pasir Mandoge dan Desa Huta Padang masuk

kategori dengan anggaran dana desa terbesar diKecamatan Bandar Pasir Mandoge serta Desa Suka Makmur dapat dikategorikan dengan anggaran dana desa rendah.

Setelah dilakukan pemilihan terhadap desa yang akan diteliti, maka peneliti akan menentukan jumlah sampel dari ketiga desa yang telah ditentukan. Jumlah populasi dalam penelitian ini dari tiga desa yang telah ditentukan adalah seluruh penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang berjumlah 523 orang. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi dengan cara menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin (Sugiyono, 2017). Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Presentase derajat kesalahan yang masih bisa ditolerir

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 523 penerima, sehingga persentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{523}{1 + 523(10)^2} = \frac{523}{1 + 523(0,1)^2} = 83,94$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sampel yang didapat berjumlah 84 (dibulatkan), namun dalam hal ini sebagai peneliti pemula penulis memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana maka jumlah sampel disesuaikan oleh peneliti menjadi 60 responden dari 3 desa yang telah dipilih yaitu Desa Bandar Pasir Mandoge, Huta Padang, Suka Makmur. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jumlah Sampel

No.	Desa	Jumlah Sampel	
		Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Padat Karya Tunai Desa
1	Bandar Pasir Mandoge	15	5
2	Huta Padang	18	5
3	Suka Makmur	12	5
Total		45	15
60 Responden			

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder, dan data primer bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

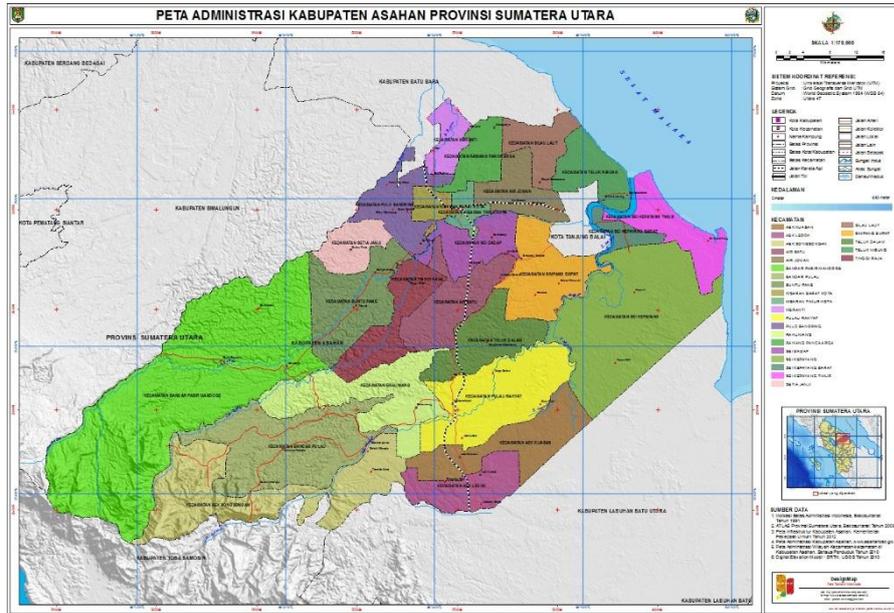
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Asahan

a. Letak

Kabupaten Asahan berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Terletak pada garis $2^{\circ}30'00''$ - $3^{\circ}10'00''$ Lintang Utara, $99^{\circ}01'$ - $100^{\circ}00'$ Bujur Timur dengan ketinggian 0–1.000 m diatas permukaan laut. Kabupaten Asahan menempati area seluas 3.732,97 km² yang terdiri dari 25 Kecamatan, 204 Desa/Kelurahan Definitif. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan Kecamatan yang terluas, dengan luasnya sebesar 713,63 km² atau sekitar 19,11 % dari total luas Asahan, diikuti Kecamatan Sei Kepayang dengan luas 370,69 km² atau 9,93 %. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Kisaran Timur dengan luas 30,16 km² atau sekitar 0,80% dari total luas wilayah Kabupaten Asahan. Secara geografis kabupaten Asahan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batu Bara,
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Labuhan batu Utara dan Kabupaten Toba Samosir,
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Asahan



Sumber : <https://asahankab.go.id>

Tabel 4.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan

No.	Kecamatan	Luas	Persentase (%)
1	Bandar Pasir Mandoge	713,6321	19,11
2	Bandar Pulau	268,4124	7,19
3	Aek Songsongan	282,2056	7,55
4	Rahuning	195,7978	5,24
5	Pulau Rakyat	213,6475	5,72
6	Aek Kuasan	143,1331	3,83
7	Aek Ledong	85,1169	2,27
8	Sei Kepayang	370,6919	9,93
9	Sei Kepayang Barat	49,1921	1,31
10	Sei Kepayang Timur	100,6452	2,69
11	Tanjung Balai	88,6836	2,37
12	Simpang Empat	135,7699	3,63
13	Teluk Dalam	117,0128	3,13
14	Air Batu	117,1454	3,13
15	Sei Dadap	82,7819	2,21
16	Buntu Pane	153,3986	4,10

17	Tinggi Raja	107,8977	2,89
18	Setia Janji	62,3702	1,67
19	Meranti	45,3276	1,21
20	Pulo Bandring	86,9936	2,33
21	Rawang Panca Arga	67,3702	1,80
22	Air Joman	98,0944	2,62
23	Silo Laut	84,6758	2,26
24	Kisaran Barat	32,8052	0,87
25	Kisaran Timur	30,1678	0,80

Sumber : <https://asahankab.go.id> (Kabupaten Asahan Dalam Angka 2017)

Berdasarkan luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang luas terbesar adalah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dengan luas 713,6321 km² atau sekitar 19,11 persen dari total luas Kabupaten Asahan, diikuti Kecamatan Sei Kepayang dengan luas 370,6919 Km² atau 9,93 persen. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kisaran Timur dengan luas 30,1678km² atau sekitar 0,80persen dan diikuti oleh Kecamatan Kisaran Barat dengan 32,8052 0,87 persen dari total luas wilayah Kabupaten Asahan. Rata-rata luas wilayah di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge digunakan untuk lahan perkebunan kelapa sawit.

b. Topografi

Kondisi topografi di Kabupaten Asahan sebagian besar berupa dataran rendah dengan ketinggian yang relatif bervariasi berkisar antara 0-1000 meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan daerah tertinggi di Kabupaten Asahan dengan ketinggian mencapai 173 mdpl sedangkan wilayah Kecamatan Sei Kepayang Barat merupakan daerah terendah dengan ketinggian sekitar 2 mdpl. Ketinggian wilayah setiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Tinggi Wilayah Kecamatan di Kabupaten Asahan

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mpdl)
1	Bandar Pasir Mandoge	173
2	Bandar Pulau	60
3	Aek Songsongan	51
4	Rahuning	38
5	Pulau Rakyat	20
6	Aek Kuasan	36
7	Aek Ledong	26
8	Sei Kepayang	4
9	Sei Kepayang Barat	2
10	Sei Kepayang Timur	7
11	Tanjung Balai	4
12	Simpang Empat	9
13	Teluk Dalam	31
14	Air Batu	12
15	Sei Dadap	9
16	Buntu Pane	65
17	Tinggi Raja	50
18	Setia Janji	47
19	Meranti	10
20	Pulo Bandring	6
21	Rawang Panca Arga	10
22	Air Joman	6
23	Silo Laut	6
24	Kisaran Barat	25
25	Kisaran Timur	23

Kondisi Topografi Kecamatan Bandar Pasir Mandoge memiliki tinggi daerah diatas permukaan laut sebesar 173 mdpl, artinya Kecamatan Bandar Pasir Mandoge berada didaerah perbukitan. Sehingga dataran tersebut banyak digunakan untuk lahan baik perkebunan maupun pertanian. Dan mayoritas pekerjaan

masyarakat Kecamatan Bandar Pasir Mandoge adalah sebagai petani dan bekerja diperusahaan perkebunan.

c. Iklim

Kabupaten Asahan termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim hujan pada bulan November sampai bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

Menurut catatan Stasiun Klimatologi PTPN III Kebun Sei Dadap, pada tahun 2016 terdapat 119 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 2.070mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Februari yaitu 273 mm dengan hari hujan sebanyak 11 hari. Sedangkan curah hujan paling kecil terjadi pada bulan April sebesar 51 mm dengan hari hujan sebanyak 4 hari. Rata-rata curah hujan tahun 2016 mencapai 172,5 mm/bulan.

4.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Asahan

a. Jumlah Penduduk

Kabupaten Asahan merupakan Kabupaten kelima dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera Utara setelah Simalungun, Langkat, Deli Serdang dan Medan. Jumlah penduduk Asahan berdasarkan tahun 2017 berjumlah 718.718 jiwa termasuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap. Berikut tabel rincian jumlah penduduk di kabupaten Asahan tahun 2017 per kecamatan;

Tabel 4.3

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten
Asahan 2017 (jiwa)**

No	Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bandar Pasir Mandoge	18109	17220	35329
2	Bandar Pulau	11258	10747	22005
3	Aek Songsongan	8911	8792	17703
4	Rahuning	9489	9315	18804
5	Pulau Rakyat	17031	16919	33950
6	Aek Kuasan	12362	12155	24517
7	Aek Ledong	10701	10450	21151
8	Sei Kepayang	9142	9238	18380
9	Sei Kepayang Barat	6938	6818	13756
10	Sei Kepayang Timur	4745	4486	9231
11	Tanjung Balai	19024	18505	37529
12	Simpang Empat	21399	20996	42395
13	Teluk Dalam	9350	9194	18544
14	Air Batu	21154	20924	42078
15	Sei Dadap	16776	16364	33140
16	Buntu Pane	12087	12155	24242
17	Tinggi Raja	9738	9721	19459
18	Setia Janji	6143	6156	12299
19	Meranti	10325	10509	20834
20	Pulo Bandring	14987	14805	29792
21	Rawang Panca Arga	9542	9299	18841
22	Air Joman	24817	24452	49269
23	Silo Laut	10836	10810	21646
24	Kisaran Barat	29388	30191	59579
25	Kisaran Timur	36649	37596	74245
	Total	360901	357817	718718

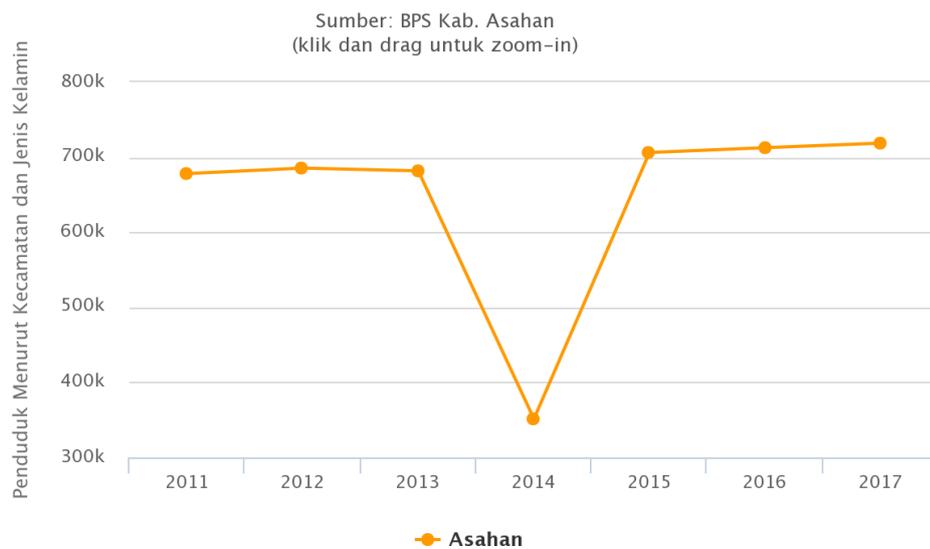
Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan (www.asahankab.bps.go.id)

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Asahan pada tahun 2017 tercatat 718.718 jiwa dengan rincian 360.901 jiwa penduduk laki-laki dan 357.817 jiwa penduduk perempuan. Maka diatas bahwa

Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan kisanan Timur dengan jumlah penduduknya 74.245 jiwa dan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Sei Kepayang Timur dengan 9.231 jiwa. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge memiliki total jumlah penduduk yaitu 35.329 dengan rincian jumlah penduduk laki-laki yaitu 18.109 dan jumlah penduduk perempuan yaitu 17.220. Sehingga dapat dilihat dari jumlah penduduk keseluruhan melalui setiap kecamatan, bahwa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge memiliki jumlah penduduk yang sedang atau tidak terlalu padat.

Gambar 4.2 Grafik Penduduk Kabupaten Asahan

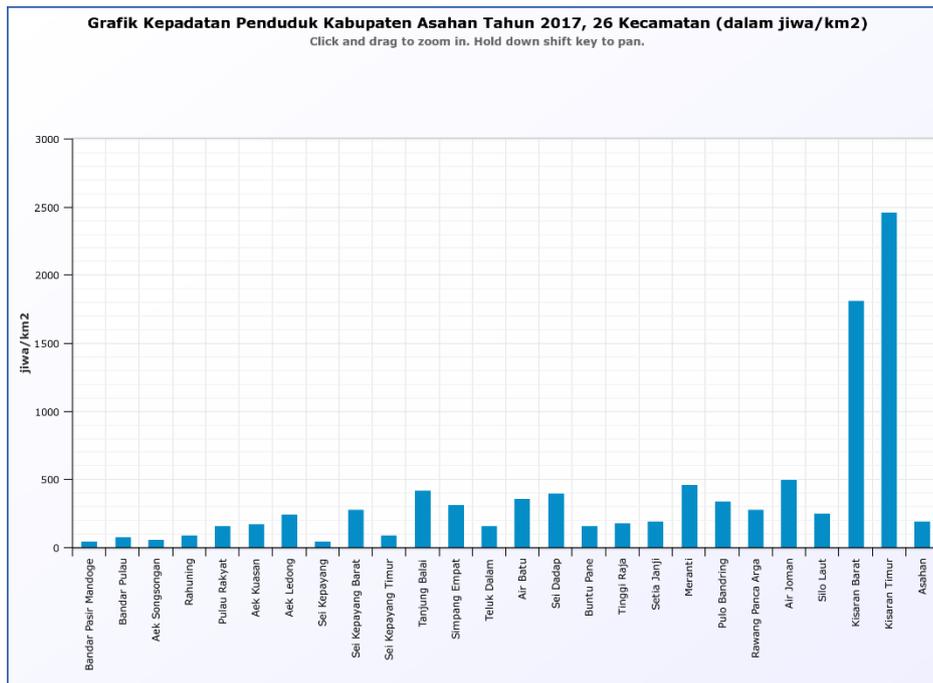
Grafik Penduduk Kabupaten Asahan 7 Tahun Terakhir



Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan (www.asahankab.bps.go.id)

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Asahan pada tahun 2017 tercatat 718.718 jiwa dengan rincian 360.901 jiwa penduduk laki-laki dan 357.817 jiwa penduduk perempuan. Terlihat pertumbuhan jumlah penduduk di kabupaten Asahan dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan setelah pada tahun 2014 mengalami penurunan drastis dengan jumlah > 300.000 jiwa.

Gambar 4.3 Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Asahan



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan (www.asahankab.bps.go.id)

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Asahan pada tahun 2017 < 500 jiwa/km². Terlihat kepadatan jumlah penduduk terbesar terdapat pada kecamatan Kisaran Timur sebesar > 2000 jiwa/km² disusul oleh kecamatan Kisaran Barat > 1500 jiwa/km². Sedangkan kepadatan jumlah penduduk terkecil terdapat pada kecamatan Sei Kepayang dan Bandar Pasir Mandoge < 500 jiwa/km².

b. Tenaga Kerja

Tabel 4.4

**Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2015**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15-19	9890	3226	13116
20-24	20002	9905	29907
25-29	23165	12552	35717
30-34	23952	8912	32864
35-39	23609	9473	33082
40-44	21656	11990	33646
45-49	19634	12811	32445
50-54	16003	9409	25412
55-59	12936	6836	19772
60+	14025	7012	21037
Jumlah	184872	92126	276998

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan (www.asahankab.bps.go.id)

Dari data diatas menunjukkan tingkat usia kerja 30-34 paling banyak untuk laki-laki sebesar 23.952 jiwa dan usia kerja 45-49 untuk perempuan sebesar 12.811 jiwa. Total pekerja di Kabupaten Asahan usia kerj 15-60 tahun keatas yaitu 276.998 jiwa. Selain itu usia kerja 15 tahun keatas sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan yang bekerja menurut jenis kegiatan utama sebagai berikut;

Tabel 4.5

**Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan
Utama**

Jenis Kegiatan Utama	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Jiwa)		
	2013	2014	2015
Angkatan Kerja	294118	285110	261703
Bekerja	276998	279873	248052
Penganggur	17120	5237	13651
Bukan Angkatan Kerja	186820	189750	193345
Sekolah	44493	53210	47062
Mengurus Rumah Tangga	117247	115302	115460
Lainnya	25080	21246	30823
Jumlah	480938	474868	455048
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61.16	60.04	57.51
Tingkat PengangguranTerbuka (TPT)	5.82	1.84	5.22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan (www.asahankab.bps.go.id)

Pada tabel diatas jumlah angkatan kerja setiap tahunnya mengalami penurunan dimana tahun 2015 berjumlah 261.703 jiwa. Penurunan tersebut berpengaruh terhadap jumlah orang yang bekerja tercatat pada tahun 2015 berjumlah 248.052 jiwa. Untuk pengangguran pada tahun 2014 mengalami penurunan drastis sebesar 5.237 jiwa dan ditahun berikutnya mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 13.651 jiwa.

4.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Asahan

Potensi ekonomi sangat penting pada pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di Kabupaten Asahan, caranya dengan distribusi yang mendominasi di

wilayah/daerah tersebut dan mengembangkan untuk mendorong ditribusi yang lain agar terdorong maju dan berkembang dengan tujuan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkelanjutan. Secara umum terdapat empat sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Asahan yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan, jasa dan hotel. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah untuk mengatur dan mengelola dengan mengembangkan distribusi tersebut. Untuk melihat perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB dari segi lapangan usaha yang mendominasi.

Tabel 4.6

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Asahan (miliar rupiah) 2016-2020

No.	Kategori/Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9463.53	9957.32	10558.75	11169.16	11365.53
2	Pertambangan dan Penggalian	44.34	47.11	50.03	52.97	52.37
3	Industri Pengolahan	4729.62	4958.87	5155.37	5361.63	5401.35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21.52	22.96	23.92	24.76	26.05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.48	13.27	13.47	14.31	14.81
6	Konstruksi	1415.10	1489.21	1570.83	1667.39	1568.04
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3766.58	4013.88	4281.48	4576.02	4525.59
8	Transportasi dan Pergudangan	750.21	816.16	854.50	912.71	874.39

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	182.76	194.89	207.02	220.81	207.96
10	Informasi dan Komunikasi	109.33	117.01	125.30	135.41	146.72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	330.41	339.47	352.07	362.76	364.13
12	Real Estate	355.08	379.68	402.83	424.30	435.11
13	Jasa Perusahaan	9.07	9.65	10.15	10.67	10.52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	675.90	701.47	744.73	791.26	788.17
15	Jasa Pendidikan	187.88	197.71	210.17	218.94	220.98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	133.61	143.00	151.81	159.42	159.04
17	Jasa lainnya	115.30	123.67	132.43	142.74	138.81
18	PDRB	22302.70	23525.35	24844.87	26245.24	26299.57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan (www.asahankab.bps.go.id)

Pada tabel diatas menggambarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Asahan menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2020 . Berdasarkan Tabel diatas selama kurun waktu tahun 2016-2020 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang paling dominan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi hampir setengah dari total keseluruhan PDRB di Kabupaten Asahan, dan setiap tahunnya sektor ini terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Asahan. Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 9463,53 miliar, ditahun berikutnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga pada tahun 2020 sebesar Rp. 11365.53 milyar. Tingginya kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Asahan karena berdasarkan

topografi wilayahnya dan daerah potensial dijadikan sebagai tanah pertanian dan perkebunan. Kemudian sektor pertanian di Kabupaten Asahan juga memenuhi kebutuhan di Kabupaten dan daerah lainnya sehingga komoditas sektor pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman bahan pangan (padi, jagung, ubi, kacangtanah, dan lainnya) serta sektor perkebunan (karet, kelapa sawit, kakao, dan lainnya) adalah komoditas andalan yang untuk diekspor. Dari 25 kecamatan di Kabupaten Asahan salah satu kecamatan penghasil pertanian dan perkebunan adalah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

Sektor lain yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Asahan adalah sektor industri pengolahan, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang trendnya mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2016 sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp. 4729,62 miliar terhadap PDRB Kabupaten Asahan, meningkat menjadi Rp4958,87 miliar di tahun 2017. Pada tahun 2018 sektor industri pengolahan sebesar Rp. 5155,37 miliar, meningkat sebesar Rp5361,63 miliar di tahun 2019, dan di tahun 2020 sektor industri pengolahan masih mengalami kenaikan sebesar Rp5401,35 miliar. Hal ini disebabkan tingginya permintaan akan pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Di Kabupaten Asahan sektor Industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan atau penggalian. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin, atau peralatan khusus.

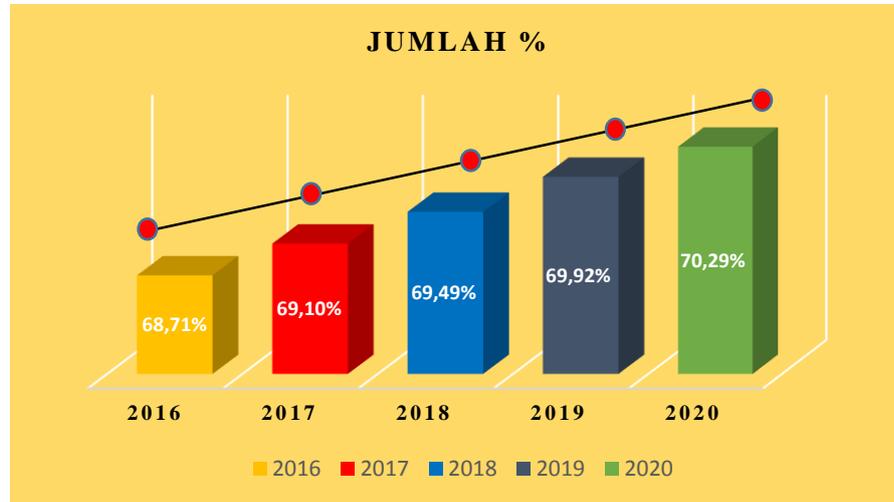
Selanjutnya sektor yang minim memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Asahan adalah sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa Perusahaan merupakan sektor yang trendnya mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp. 9.07 miliar terhadap PDRB Kabupaten Asahan, meningkat menjadi Rp. 9.65 miliar di tahun 2017. Pada tahun 2018 sektor Jasa Perusahaan sebesar Rp. 10.15 miliar, meningkat sebesar Rp. 10.67 miliar di tahun 2019, dan di tahun 2020 sektor Jasa Perusahaan mengalami Penurunan sebesar Rp. 10.52 miliar dari tahun sebelumnya.

4.1.4 Kondisi Sosial Kabupaten Asahan

Kondisi sosial merupakan keadaan yang berkaitan dengan situasi dalam masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk melihat kondisi soaial suatu daerah, dimana IPM Kabupaten Asahan mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, kesehatan, dan hidup layak melalui kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Sehingga berpengaruh pada tingkat kemiskinan di suatu daerah, keberadaan penduduk miskin dalam suatu wilayah tidak akan membawa kemakmuran bagi wilayah tersebut. Sehingga untuk melihat kondisi sosial di Kabupaten Asahan melalui grafik indeks pembangunan manusia sebagai berikut.

Gambar 4.4

Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan (www.asahankab.bps.go.id)

Jika dilihat lebih detail, tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Asahan dihasilkan dari peningkatan komponen penyusun IPM. Kenaikan terjadi baik dari nilai angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah, hingga pengeluaran riil per kapita. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Asahan pada tahun 2016 sebesar 68,71persen, meningkat 69,10 persen ditahun 2017. Pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia kembali mengalami peningkatan sebesar 69,49 persen, tahun 2019 tumbuh sebesar 69,92 persen dan ditahun 2020 terus mengalami trend peningkatan sebesar 70,29 persen. Selama periode 2016 hingga 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Asahan menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia mengalami peningkatan. Pembangunan manusia Kabupaten Asahan telah berstatus “tinggi” mulai tahun 2016 hingga 2020.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah, untuk melihat jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Asahan dapat dilihat dari gambar berikut

Gambar 4.5

Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan (www.asahankab.bps.go.id)

Kemiskinan menjadi persoalan yang membutuhkan konsentrasi tinggi untuk ditangani pemerintah di suatu daerah. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Asahan mengalami tren menurun selama periode 2016-2020. Dapat dilihat persentase penduduk miskin di kabupaten Asahan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu di tahun 2016 di Kabupaten Asahan yaitu sebesar 11,86 persen, mengalami penurunan 11,67% di tahun 2017. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin mengalami penurunan dengan persentase menjadi 10,25%. Tahun 2019 terus mengalami penurunan dengan persentase 9,68% persen dan di tahun 2020 trend penurunan kembali mengalami sebesar 9,04 persen. Persentase penduduk miskin di kabupaten Asahan terus dilakukan upaya

penurunannya oleh pemerintah kabupaten agar tidak terjadinya ketimpangan sosial. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun kebijakan pemerintah yang menyangkut kemiskinan juga berpengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Asahan menurun setiap tahunnya salah satunya dipengaruhi oleh perubahan rata-rata upah buruh per hari. Berdasarkan data BPS, tercatat ada kenaikan upah buruh di bulan September 2019 sebesar 1,02% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya di bulan Maret 2019 dari 9,41% menjadi 9,22%. Kemudian meningkatnya kuota penerima pelaksana program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan program bantuan lainnya dari pemerintah.

4.2 Analisis Penelitian

4.2.1 Analisis Perkembangan Transfer Payment Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu teori makro dan teori mikro.

Dalam tinjauan mikro, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang

publik yang akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Terkait dengan perkembangan pengeluaran pemerintah, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (Mangkoesoebroto, 2001):

- a. Perubahan permintaan akan barang publik;
- b. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi;
- c. Perubahan kualitas barang publik;
- d. Perubahan harga faktor produksi;

Sedangkan dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi (Boediono,1998) :

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa;
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai;
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

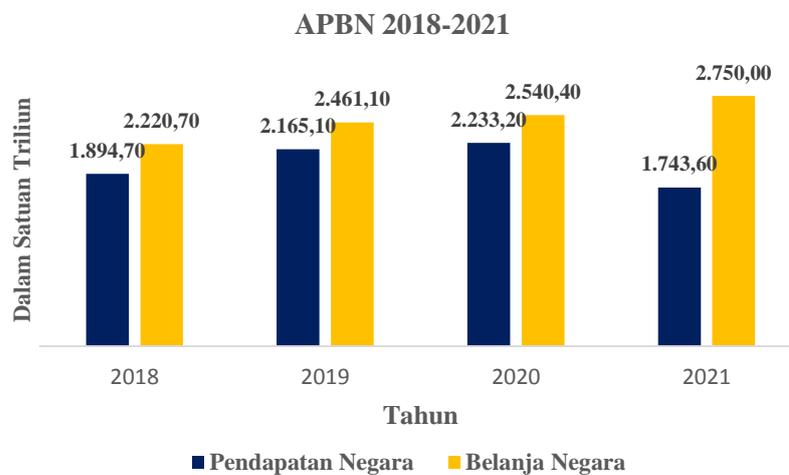
Pada pemerintah pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan lain-lain.

Landasan hukum serta tata cara penyusunan APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1,2, dan 3. Pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran

rakyat. Pada Pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh preseiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pada Pasal 23 ayat 3 disebutkan apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.

Gambar 4.6 Grafik APBN Tahun 2018-2021



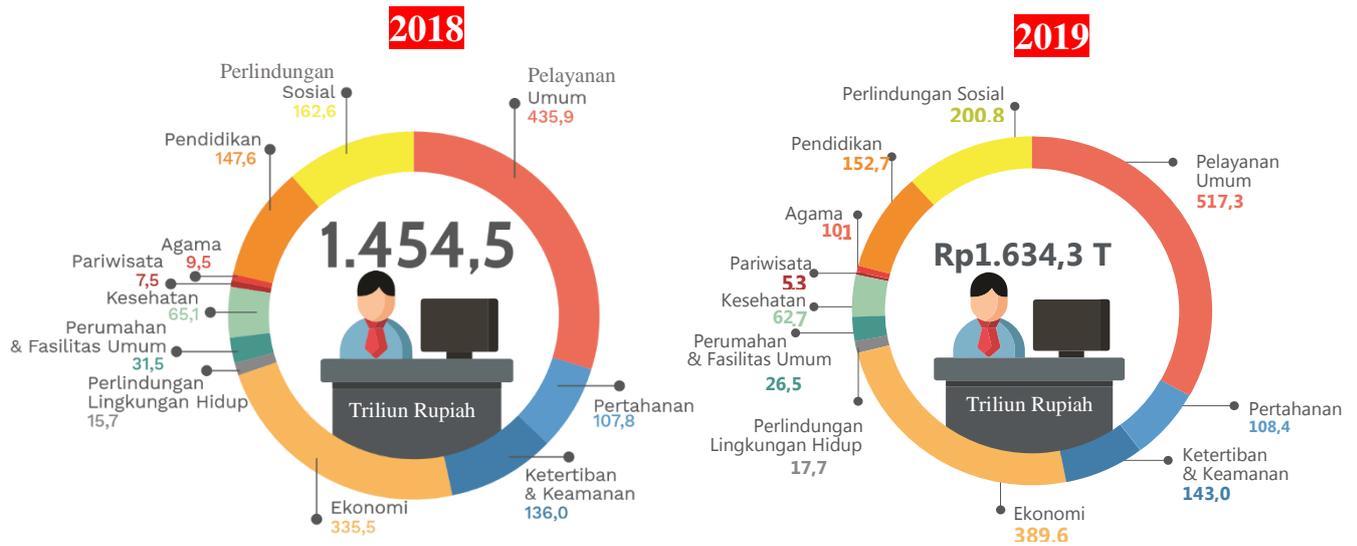
Sumber : Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id)

Pada grafik diatas menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018-2020. Tahun 2018 Pendapatan Negara sebesar Rp. 1.894,7 Triliun, mengalami peningkatan Rp. 2.165,10 Triliun pada tahun 2019. Ditahun 2020 pendapatan negara kembali tumbuh sebesar Rp. 2.233,2 Triliun dan ditahun 2021 pendapatan negara sebesar Rp. 1.743,6 Triliun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan negara disebabkan akibat dari imbasnya Virus Covid-19 terhadap perekonomian. Sedangkan untuk belanja negara tahun 2018 sebesar Rp. 2.220,7 Triliun, mengalami peningkatan Rp. 2.461,1 Triliun pada tahun 2019. Tahun 2020 belanja negara meningkat Rp. 2.540,4 Triliun, kembali mengalami peningkatan tahun 2021 sebesar Rp. 2.750,0 Triliun. Peningkatan

belanja negara ditahun 2021 terjadi karena pemerintah fokus dalam penanganan pandemi covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Dalam APBN Pendapatan negara dan hibah didapat dari dua sektor yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Di penerimaan dalam negeri masih dibagi lagi menjadi dua sektor yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan penerimaan perpajakan masih dibagi menjadi dua sektor lagi yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak, penerimaan perpajakan memiliki jumlah yang lebih besar. Hal ini menandakan bahwa pajak merupakan pendapatan terpenting dari pemerintah. Besar kecilnya pajak yang ditentukan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Karena besarnya pendapatan baik dari pajak atau bukan, secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah pengeluaran yang juga akan meningkat. Pengeluaran pemerintah atau belanja negara disini dibagi menjadi tiga sektor yaitu belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan suspen. Belanja pemerintah pusat sendiri disini dibagi lagi menjadi dua sektor yaitu K/L (Kementerian/Lembaga) dan non K/L (Kementerian/Lembaga). Kemudian transfer ke daerah juga dibagi menjadi dua sektor yaitu dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Gambar 4.7 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi 2018 & 2019

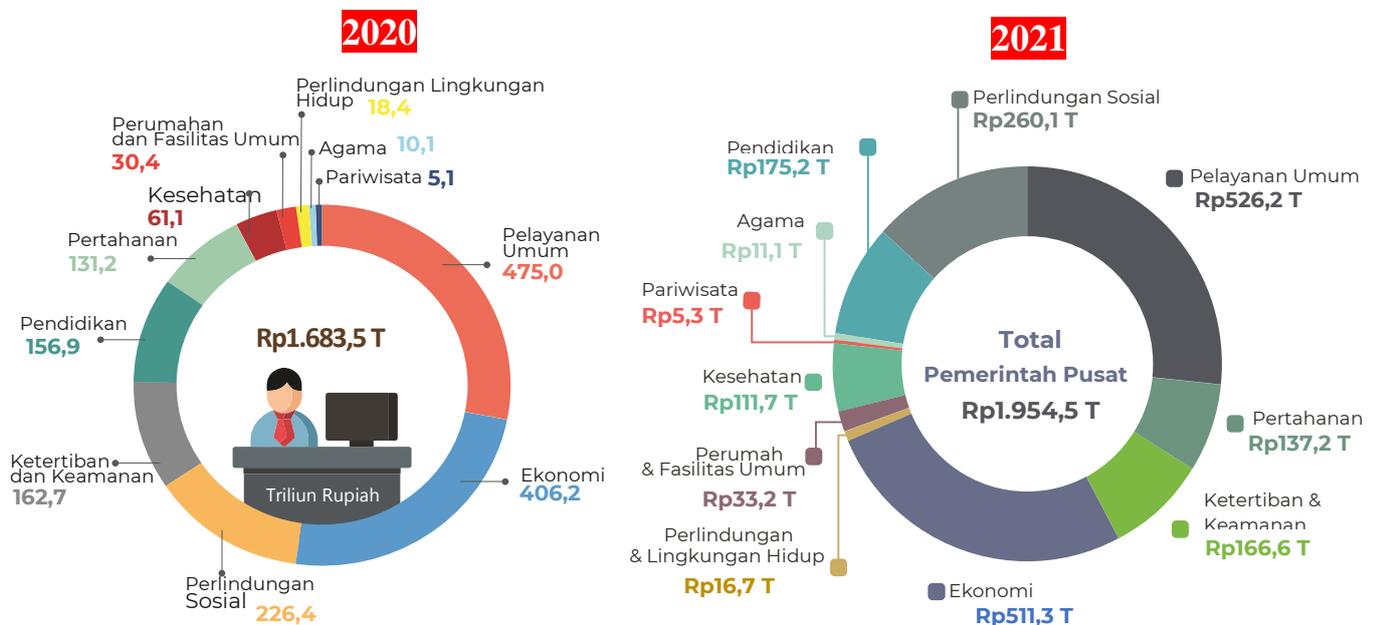


Sumber : Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id)

APBN merupakan instrumen kebijakan penting untuk mencapai tujuan nasional dan pelaksanaan program Nawacita. Pemerintah terus berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, jika dilihat pada APBN tahun 2018 fokus/prioritas pemerintah yaitu: (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-pendapatan dan antarwilayah; serta (3) perluasan kesempatan kerja. Dilihat dari gambar tersebut Fungsi Pelayanan Umum dengan anggaran terbesar dimana untuk pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah termasuk pada pihak ketiga, disusul Fungsi Ekonomi untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya dorong ekonomi. Dalam pernyataan Menteri Keuangan pada program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 akan meningkat dari 6 juta menjadi 10 juta penerima. Perluasan bantuan non tunai, beras sejahtera (Rastra). Di samping itu, yang tak kalah penting adalah kesehatan dan pendidikan. Dari sisi infrastruktur, diprioritaskan pendanaan bagi proyek strategis pemerintah yang sedang berjalan serta tiga sektor strategis yang menyentuh hingga

ke akar rumput yaitu sektor perikanan, pertanian dan pariwisata. Sementara fokus APBN tahun 2019 adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan bidang kesehatan dengan program penurunan gizi buruk (penyebab anak kekerdilan/stunting), peningkatan anggaran pendidikan, program perlindungan sosial, serta infrastruktur yang terus dijalankan. Prioritas penggunaan APBN tahun 2018 dan 2019 dapat dikatakan masih sejalan dengan beberapa program yang masih sama dan terus dijalankan.

Gambar 4.8 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi 2020 & 2021



Sumber : Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id)

Pada APBN tahun 2020 pemerintah memfokuskan terhadap lima sektor yaitu (1) Peningkatan sumber daya manusia (2) Penguatan program perlindungan sosial (3) Akselerasi pembangunan infrastruktur (4) Birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi (5) Antisipasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Dilihat dari grafik diatas bahwa sektor terbesar terdapat pada pelayanan umum, sektor tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan Pemerintah untuk pembayaran bunga utang. Disusul sektor

ekonomi untuk mendukung strategi kebijakan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan informatika, serta peningkatan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi. Kemudian sektor Perlindungan Sosial untuk mendukung penguatan kualitas SDM melalui penguatan perlindungan sosial. Pada APBN tahun 2021 fokus pemerintah mengalami sedikit perubahan dimana pemerintah memprioritaskan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi, perubahan fokus ini akibat dari dampak pandemi covid-19. Dalam hal ini meliputi penanganan kesehatan, kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, infrastruktur yang masif.

Pada sektor transfer daerah Pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya percepatan penyaluran dana Transfer ke Daerah dan mendorong pelaksanaan atau realisasi belanja pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dana transfer ke daerah terdiri dari: (1) Dana Perimbangan; dan (2) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana otonomi khusus terdiri atas dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat serta dana otonomi khusus untuk NAD. Sementara untuk komponen dana penyesuaian yang bersifat *ad-hoc*, terdiri atas beberapa jenis dana yang penamaannya mengalami perubahan/penambahan setiap tahun anggaran.

Dana Transfer ke Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian

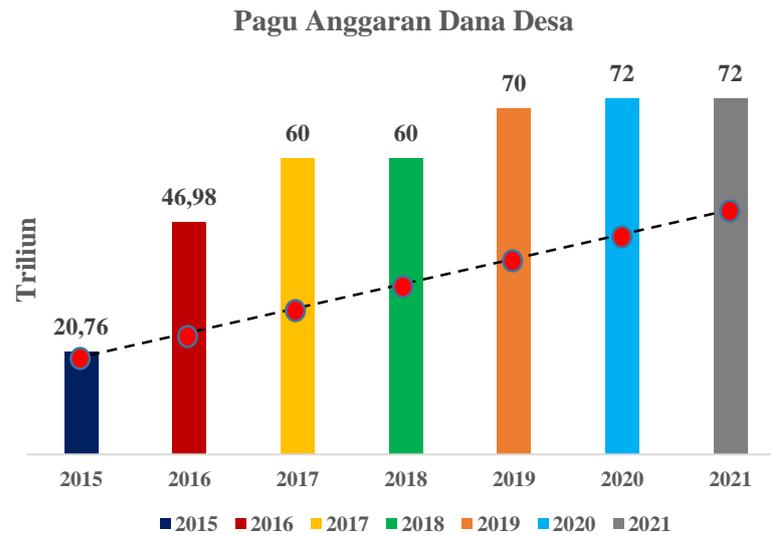
otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Salah satu yang menjadi fokus transfer daerah yaitu Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Pada tahun 2020 prioritas penggunaan dana desa diubah oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No.6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwa dana desa digunakan untuk penanganan pandemi covid-19 melalui program bantuan langsung tunai dana

desa (BLT DD) dan padat karya tunai desa (PKTD) guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa akibat dampak dari pandemi covid-19. Berikut perkembangan dana desa;

Gambar 4.9 Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2021



Sumber : Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id)

Dana desa menjadi salah satu kebijakan di pemerintahan Jokowi – JK. Total Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp 401,74 triliun. Pada tahun 2015 Alokasi dana desa dari APBN sebesar Rp 20,76 triliun dengan rata-rata setia desa mendapat alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016 alokasi dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 46,98 trilion naik 1 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun untuk dana desa dengan rata-rata perdesa mendapatkan sebesar Rp 800,4 juta. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 46,98 triliun. Tahun 2018 anggaran untuk dana desa tidak mengalami peningkatan dan penurunan, sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp 60 triliun. Pada tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 70 triliun dengan rata-rata setiap

desa sebesar Rp 933 juta. Kemudian pada tahun 2020 anggaran dana desa meningkat sebesar Rp 72 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 960 juta. Pada tahun 2017 dan 2018 Dana Desa dikeluarkan sebesar 8,5 % dari anggaran Transfer ke daerah. Dengan meningkatnya Dana Desa pada setiap tahun, diharapkan kualitas pembangunan desa juga bisa ditingkatkan baik infrastruktur desa maupun sumber daya manusianya.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan ke-sejahteraan mereka. Tantangan terbesar pertama dalam pelaksanaan Dana Desa adalah bagaimana agar Dana Desa yang masuk ke desa tersebut dapat dibagi dengan adil, Mengingat tingginya keberagaman ukuran (jumlah penduduk, luas wilayah), tingkat kemiskinan dan tingkat kemajuan desa di Indonesia.

4.2.2 Analisis dan Evaluasi Perkembangan Dana Desa Pada Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Penelitian ini mengambil objek penelitian sebanyak 3 (tiga) desa dari 9 (sembilan) desa yang ada di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Desa tersebut ialah Desa Bandar Pasir Mandoge, Desa Suka Makmur, dan Desa Huta Padang. Alasan pemilihan sampel di 3 (tiga) desa tersebut karena letak desanya saling berdekatan, termasuk desa dengan tingkat aktivitas ekonomi yang baik, serta kategori penerima Dana Desa terbesar dan

terkecil diantara desa yang lain pada Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Secara tidak langsung besarnya Dana Desa tersebut akan berpengaruh pada jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai (PKT) Desa yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa dimasa pandemi saat ini. Disamping itu penelitian ini mengalami keterbatasan waktu akibat dari adanya pandemi Virus Covid-19.

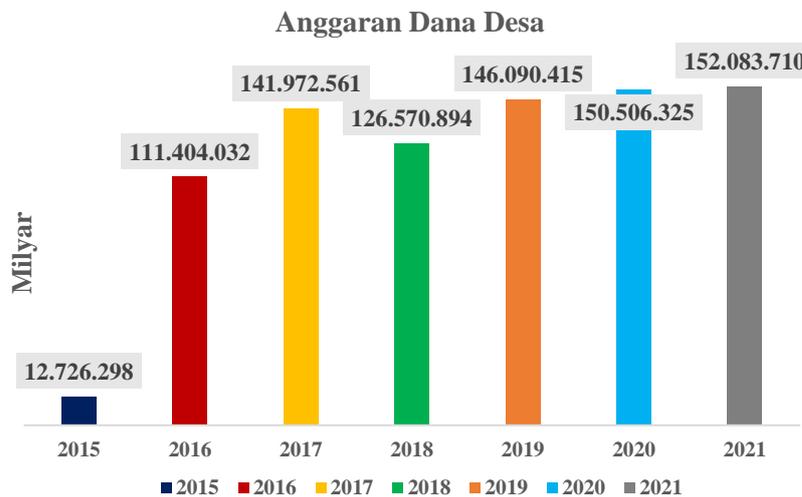
Dalam hal ini untuk menguatkan data yang diperoleh dari observasi lapangan maka dilakukan riset menggunakan cara wawancara Pemerintahan Desa serta penyebaran beberapa kuesioner ke pada keluarga penerima manfaat. Apakah data yang diperoleh dari aparat desa sesuai dengan kenyataan yang ada pada keluarga penerima manfaat. Total kuesioner yang disebar pada desa yang terpilih sebanyak 60 responden yang diambil menurut penyebaran tempat tinggal penduduk, dalam arti Desa Bandar Pasir Mandoge 15 responden, Desa Huta Padang 18 responden, Desa Suka Makmur 12 responden untuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan untuk penerima Padat Karya Tunai Desa 5 responden dari setiap desa yang terpilih. Hal ini dilakukan untuk melihat ketepatan penyaluran bantuan yang bersumber dari Dana Desa dan penggunaan Dana Desa untuk program Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai Desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa, dalam melaksanakan program-program dana desa sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan desa melalui potensi geografis, ekonomi, sosial serta lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah

mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka Kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Gambar 4.10

Perkembangan Dana Desa Kabupaten Asahan Tahun 2015-2021



Sumber : Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan perkembangan dana desa di kabupaten Asahan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2015 Dana Desa Kabupaten Asahan sebesar Rp. 12.726.298.000 milyar mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2016 yaitu Rp. 111.404.032.000 milyar. Pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan yaitu Rp. 141.972.561.000 milyar. Pada tahun 2018 Dana Desa di Kabupaten Asahan mengalami penurunan yaitu Rp. 126.570.894.000 milyar, trend kenaikan dana desa meningkat signifikan sampai tahun 2021.

Pada tahun 2020 tepatnya bulan Maret Indonesia terkena dampak Virus covid-19 yang mengakibatkan perekonomian mengalami guncangan yang cukup serius. Perekonomian Indonesia melemah dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang turun, sehingga pemerintah berupaya melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan berbagai program. Salah satu programnya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang bersumber dari Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diharapkan dapat membantu masyarakat yang terkena dampak covid terutama penduduk miskin yang terdampak karena pandemi agar dapat menjaga kelangsungan hidup di masa pandemi. Program Padat Karya Tunai Desa atau biasanya disingkat dengan Program PKTD adalah salah satu program prioritas Dana Desa di masa pandemi. Padat karya tunai desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Dengan skema Padat Karya Tunai Desa dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini merupakan anggaran

pendapatan dan belanja desa yaitu Desa Bandar Pasir Mandoge, Huta Padang, dan Suka Makmur.

Tabel 4.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Bandar Pasir Mandoge, Huta Padang, Suka Makmur Tahun 2019 dan 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANDAR PASIR MANDOGHE TAHUN 2019			ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANDAR PASIR MANDOGHE TAHUN 2020		
1	PENDAPATAN		PENDAPATAN		
	Pendapatan Transfer	Rp. 1.773.066.621	Pendapatan Transfer	Rp. 1.919.307.764	
	• Dana Desa	Rp. 803.573.000	• Dana Desa	Rp. 814.040.000	
	• Bagi Hasil Pajak & Retribusi	Rp. 65.367.000	• Bagi Hasil Pajak & Retribusi	Rp. 70.777.064	
	• Alokasi Dana Desa	Rp. 902.626.621	• Alokasi Dana Desa	Rp. 1.032.990.700	
	• Pendapatan Lain-lain	Rp. 1.500.000	• Pendapatan Lain-lain	Rp. 1.500.000	
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.773.066.621	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.919.307.764	
2	BELANJA		BELANJA		
	• Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp. 589.849.000	• Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp. 751.853.264	
	• Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp. 502.422.042	• Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp. 154.750.000	
	• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 146.325.000	• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 150.200.000	
	• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 88.540.000	• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 90.840.000	
	• Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	Rp. 237.869.000	• Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	Rp. 761.786.500	
	Jumlah Belanja Surplus (Defisit)	Rp. 1.565.005.042 (208.061.579)	Jumlah Belanja Surplus (Defisit)	Rp. 1.909.429.764 (9.878.000)	
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA HUTA PADANG TAHUN 2019			ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA HUTA PADANG TAHUN 2020		
1	PENDAPATAN		PENDAPATAN		
	Pendapatan Transfer	Rp. 1.907.308.000	Pendapatan Transfer	Rp. 1.986.666.000	
	• Dana Desa	Rp. 971.481.000	• Dana Desa	Rp. 998.352.000	
	• Bagi Hasil Pajak & Retribusi	Rp. 60.530.000	• Bagi Hasil Pajak & Retribusi	Rp. 61.254.000	
	• Alokasi Dana Desa	Rp. 873.798.000	• Alokasi Dana Desa	Rp. 925.560.000	
	• Pendapatan Lain-lain	Rp. 1.500.000	• Pendapatan Lain-lain	Rp. 1.500.000	
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.907.308.000	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.986.666.000	
2	BELANJA		BELANJA		
	• Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp. 776.297.000	• Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp. 873.957.275	
	• Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp. 663.890.000	• Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp. 237.564.000	

	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan • Bidang Pemberdayaan Masyarakat • Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Jumlah Belanja Surplus (Defisit)	Rp. 152.560.000 Rp. 88.985.000 Rp. 220.125.000 Rp. 1.901.857.000 (5.451.000)	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan • Bidang Pemberdayaan Masyarakat • Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Jumlah Belanja Surplus (Defisit)	Rp. 151.386.000 Rp. 92.840.000 Rp. 629.786.500 Rp. 1.985.533.775 (1.132.225)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR TAHUN 2019			ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR TAHUN 2020	
1	PENDAPATAN Pendapatan Transfer <ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa • Bagi Hasil Pajak & Retribusi • Alokasi Dana Desa • Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan	Rp. 1.532.447.654 Rp. 814.650.000 Rp. 54.875.154 Rp. 661.512.500 Rp. 1.500.000 Rp. 1.532.447.654	PENDAPATAN Pendapatan Transfer <ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa • Bagi Hasil Pajak & Retribusi • Alokasi Dana Desa • Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan	Rp. 1.535.478.737 Rp. 822.375.000 Rp. 54.915.037 Rp. 656.688.700 Rp. 1.500.000 Rp. 1.535.478.737
2	BELANJA <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa • Bidang Pelaksana Pembangunan Desa • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan • Bidang Pemberdayaan Masyarakat • Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Jumlah Belanja Surplus (Defisit)	Rp. 569.680.731 Rp. 614.757.745 Rp. 147.563.122 Rp. 112.891.056 Rp. 85.550.000 Rp. 1.530.442.654 (2.005.000)	BELANJA <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa • Bidang Pelaksana Pembangunan Desa • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan • Bidang Pemberdayaan Masyarakat • Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Jumlah Belanja Surplus (Defisit)	Rp. 612.995.821 Rp. 506.758.022 Rp. 156.732.818 Rp. 102.696.894 Rp. 154.800.000 Rp. 1.533.983.555 (1.495.182)

Sumber : Kantor Pemerintah Desa Bandar Pasir Mandoge, Huta Padang, Suka Makmur

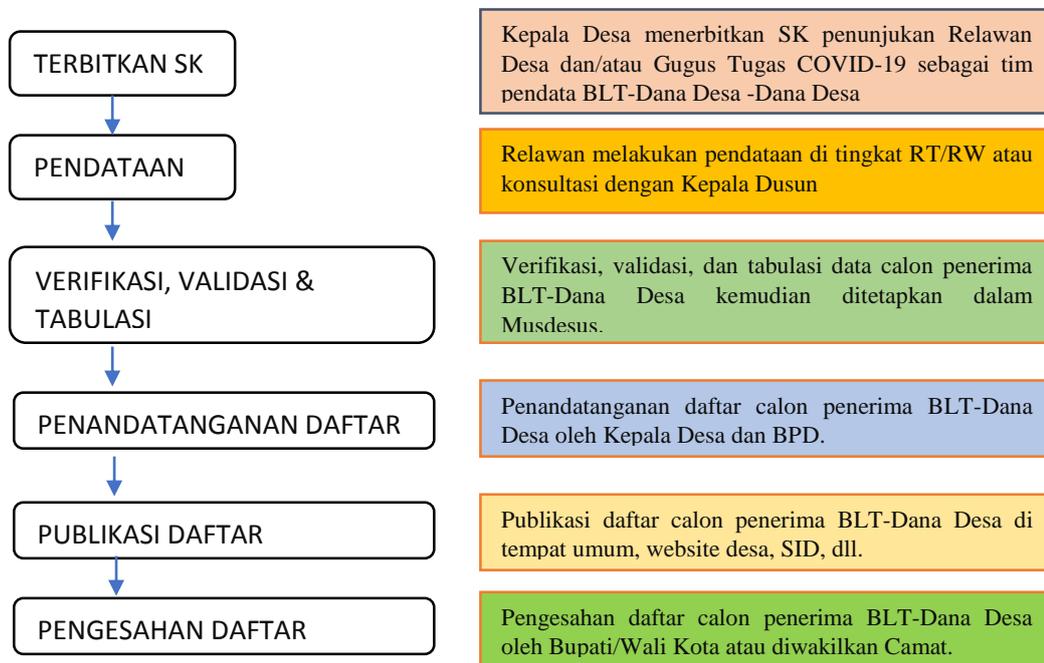
Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan pada tiga desa tersebut diantaranya Desa Bandar Pasir Mandoge, Huta Padang, Suka Makmur. Adapun Desa Bandar Pasir Mandoge mengalami peningkatan anggaran pendapatan desa tahun 2019 sebesar Rp. 1.773.066.621 meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.919.307.764. Desa Huta Padang anggaran pendapatan desa tahun 2019 sebesar Rp. 1.907.308.000 meningkatkan pada tahun 2020 sebesar Rp.

1.986.666.000. Dan desa Suka Makmur anggaran pendapatan desa tahun 2019 sebesar Rp. 1.532.447.654 meningkat ditahun 2020 sebesar Rp. 1.535.478.737. Dari ketiga desa tersebut pelaksanaan pembangunan ditahun 2020 mengalami penurunan akibat dari adanya pandemi covid-19. Fokus anggaran pemerintahan desa digunakan untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yang disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta dengan pemberdayaan masyarakat yang mengalami penurunan perekonomian dimasa pandemi dengan program Padat Karya Tunai Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti masyarakat miskin dan terdampak covid-19, masyarakat yang memiliki sakit kronis/menaun, dan masyarakat yang tidak menerima bantuan selain dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Bandar Pasir Mandoge, Suka Makmur, Huta Padang sebagian tidak mengetahui informasi adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa karena minimnya informasi, sebagian masyarakat mengetahui adanya program Bantuan Langsung Tunai dan selama melakukan pembagian bantuan masyarakat menerima pelayanan yang baik. Awal penyaluran bantuan dilakukan setiap bulan dengan jumlah Rp.300.000, namun beberapa bulan terakhir dilakukan per-triwulan dan mulai berjalan sejak April 2020.

Gambar 4.11

Alur Pendataan & Penerima BLT sesuai Peraturan Pemerintah

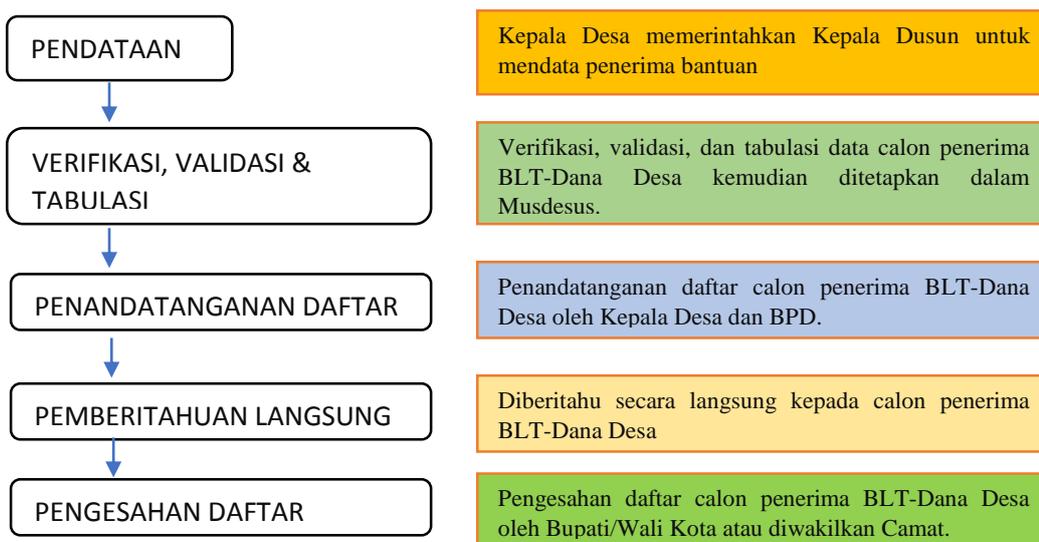


Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (www.kemendes.go.id)

Gambar 4.12

Alur Pendataan & Penerima BLT yang diterapkan di Kecamatan Bandar

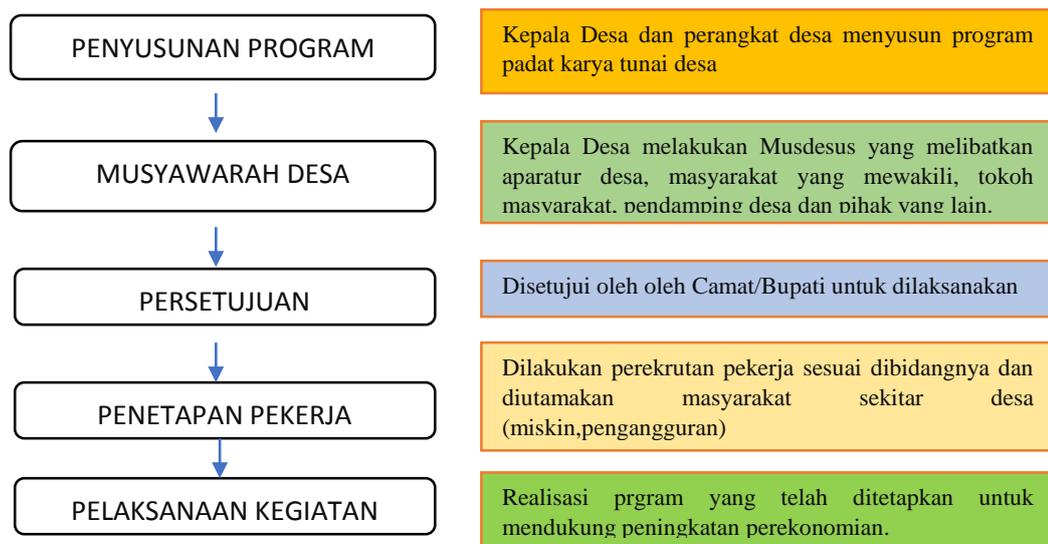
Pasir Mandoge



Pada Gambar 4.11 dan 4.12 peneliti menggabungkan untuk keterangan gambarnya tentang alur pendataan dan penerima BLT menurut peraturan pemerintah dan penerapan peraturan pemerintahan desa di kecamatan bandar pasir mandoge, dalam hal ini pemerintahan desa dikecamatan bandar pasir mandoge tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh kementerian desa. Dalam hal ini pemerintahan desa dikecamatan bandar pasir mandoge tidak menerbitkan SK dan publikasi ditempat umum ataupun website. Ini dapat menimbulkan adanya tindak kecurangan.

Gambar 4.13

Mekanisme Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa



Sumber : Kantor Desa diKecamatan Bandar Pasir Mandoge

Mekanisme pelaksanaan program padat karya tunai desa diawali dengan penyusunan program oleh kepala desa dan perangkat desa, kemudian dilakukan musyawarah desa yang melibatkan beberapa pihak, selanjutnya disetujui oleh Bupati atau diwakilkan camat, perekrutan pekerja yang diprioritaskan masyarakat sekitar desa (miskin, pengangguran), terakhir pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini

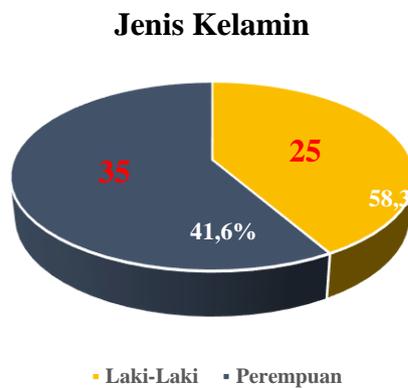
kementerian desa menyerahkan mekanisme pelaksanaan program padat karya tunai desa dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Berikut ini adalah penjelasan dari analisis mengenai hasil jawaban wawancara dan kuesioner serta juga gambaran responden yang menjawab kuesioner.

Tabel 4.8 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase %
Laki-laki	25	41,6
Perempuan	35	58,3
Total	60	100,0

Gambar 4.14 Jenis Kelamin Responden

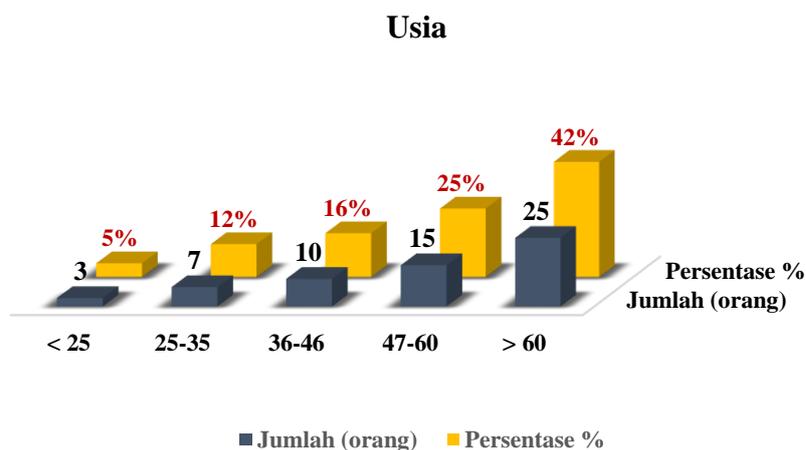


Jenis kelamin responden dalam penelitian ini yaitu penggabungan dari penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai (PKT) Dana Desa, dengan BLT berjumlah : 45 responden dan PKT berjumlah : 15 responden. Berdasarkan hasil survey yang diperoleh dari 60 responden sekitar 41,7 % responden berjenis kelamin laki-laki atau berjumlah 25 orang, serta sebesar 58,3 % responden berjenis kelamin perempuan atau berjumlah 35 responden berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.9 Usia Responden

Usia	Jumlah (Orang)	Persentase %
< 25	3	5
25 – 35	7	12
36 – 46	10	16
47 – 60	15	25
> 60	25	42
Total	60	100,0

Gambar 4.15 Usia Responden

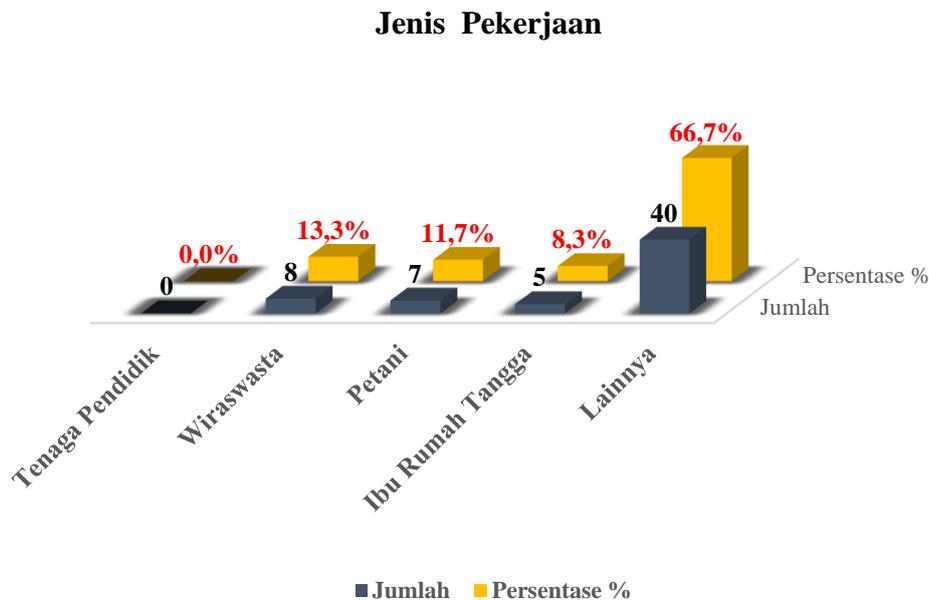


Berdasarkan grafik diatas dari 60 responden yang tersebar di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge maka diperoleh bahwasanya sebanyak 3 responden berusia < 25 tahun dengan persentase 5%, 7 responden berusia 25-35 tahun dengan persentase 12%, 10 responden berusia 36-46 tahun persentase 16%, 15 responden berusia 47-60 tahun dengan persentase 25% dan 25 responden berusia > 60 tahun dengan persentase 42%. Adapun teknik menentukan responden menggunakan metode acak tanpa harus ditentukan jumlah mewakili masing-masing usia responden.

Tabel 4.10 Jenis Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase %
Tenaga Pendidik	0	0,0
Wiraswasta	8	13,3
Petani	7	11,7
Ibu Rumah Tangga	5	8,3
Lainnya	40	66,7
Total	60	100,0

Gambar 4.16 Jenis Pekerjaan Responden



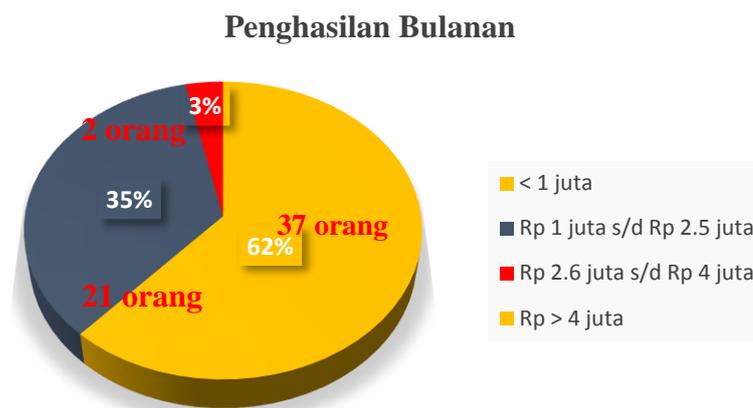
Selanjutnya berdasarkan data diatas pada jenis pekerjaan untuk Tenaga Pendidik sebanyak 0 orang, untuk pekerjaan Wiraswasta sebanyak 8 orang dengan persentase 13,3%, Petani sebanyak 7 orang, Ibu Rumah Tangga sebanyak 5 orang persentase 8,3% dan jenis pekerjaan lainnya yaitu lanjut usia dan tidak memiliki suami sebanyak 40 orang dengan jumlah persentase 66,7%. Artinya penerima BLT Dana Desa

di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang paling dominan adalah lanjut usia dan sudah tidak memiliki suami.

Tabel 4.11 Tingkat Penghasilan Perbulan

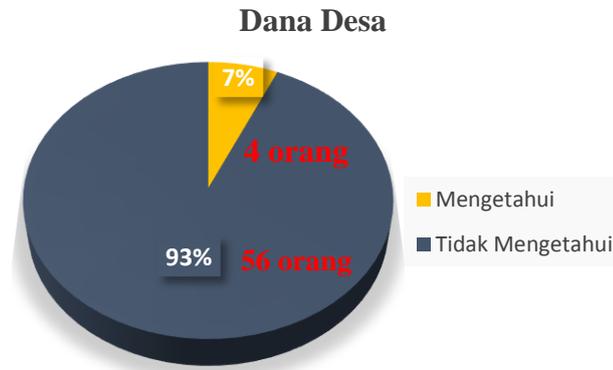
Tingkat Penghasilan	Jumlah (Orang)	Persentase %
< Rp 1 juta	37	61,7
Rp 1 juta s/d Rp 2.5 juta	21	35
Rp 2.6 juta s/d Rp 4 Juta	2	3,3
Rp > 4 juta	0	0,0
Total	60	100,0

Gambar 4.17 Tingkat Penghasilan Perbulan



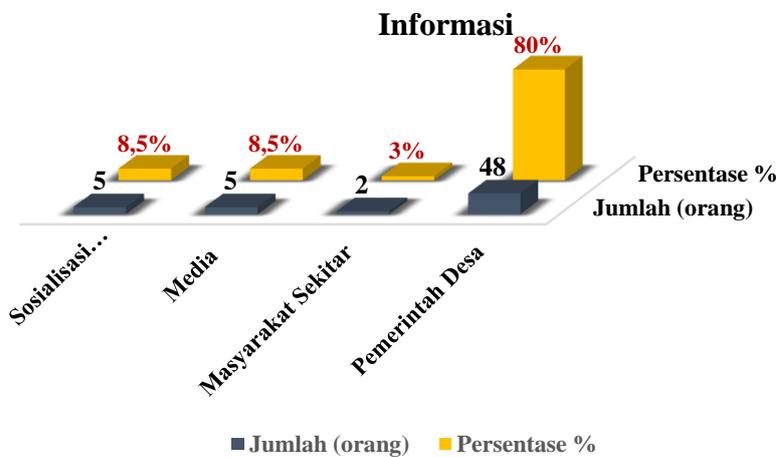
Berdasarkan data diatas pada tingkat penghasilan responden perbulannya adalah < Rp. 1.000.000 sebanyak 37 orang, untuk berpenghasilan Rp. 1.000.000 - Rp. 2.500.000 sebanyak 21 orang, yang berpenghasilan RP. 2.600.000 – Rp. 4.000.000 sebanyak 2 orang dan untuk berpenghasilan Rp. > 4.000.000 tidak ada responden. Mayoritas penerima BLT dan PKT Dana Desa berpenghasilan rendah akibat dari adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

Gambar 4.18 Pengetahuan Tentang Dana Desa



Berdasarkan data diatas pada pengetahuan tentang Dana Desa terlihat sebanyak 56 responden tidak megatahui secara jelas tentang Dana Desa dengan persentase 93 persen, responden hanya sekedar mengetahui Dana Desa dari pemerintah dan 4 responden mengetahui secara banyak tentang Dana Desa dengan persentase 7 persen, kerana mereka sering menggali informasi yang lebih dalam baik dari media online ataupun datang langsung untuk bertanya kepada pemerintah desa.

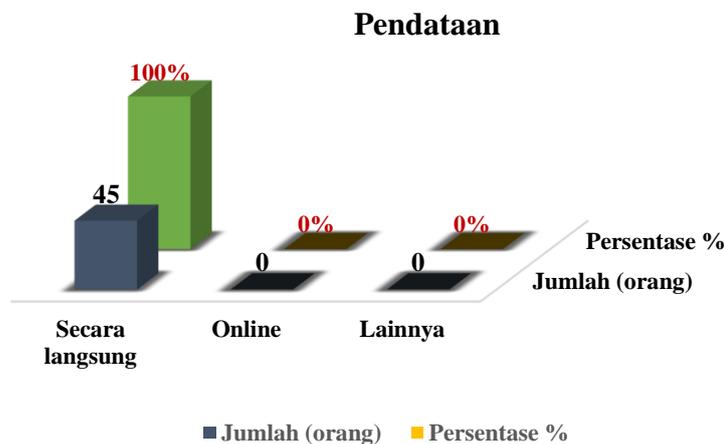
Gambar 4.19 Ketersediaan Informasi



Pada data tersebut terkait dengan ketersediaan informasi bahwa responden mengetahui dirinya sebagai penerima program “keluarga penerima manfaat” sebanyak 5 responden mengetahui karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, setelah dilakukan survei lapangan bahwasannya ke-5 responden tersebut penerima padat karya tunai yang langsung diberitahu oleh kepala desa, selanjutnya sebanyak 5 responden dengan persentase 8,5 persen mengetahui dari media online yang selanjutnya didata oleh pemerintahan desa, kemudian sebanyak 2 responden mengetahui dari masyarakat sekitar desa, dan sebanyak 48 responden mengetahui dari pemerintah desa langsung dengan mendatangi rumah para keluarga penerima manfaat.

a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

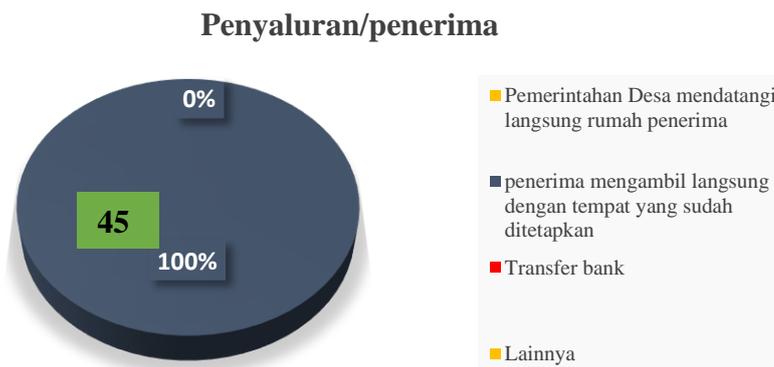
Gambar 4.20 Proses Pendataan



Berdasarkan data grafik diatas mengenai proses pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa keseluruhan responden yaitu 45 orang dilakukan pendataan dan penunjukkan sebagai keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa dengan persentase 100

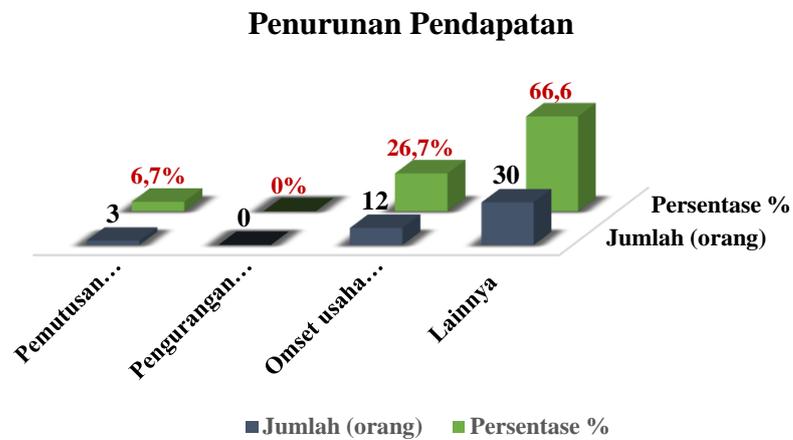
persen, pendataan menggunakan media online dan lainnya tidak ada responden. Pendataan secara langsung oleh pemerintah desa melalui kadus (kepala dusun) bagi penerima bantuan langsung tunai dana desa setelah dilakukannya survei dan musyawarah desa kemudian disetujui oleh kepala desa.

Gambar 4.21 Proses Penyaluran/penerimaan



Grafik diatas menunjukkan bahwa terkait dengan penyaluran dan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa keseluruhan responden yaitu 45 orang sistemnya penerima mengambil langsung pada tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan dilakukan pengawasan oleh lembaga kemasyarakatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas.

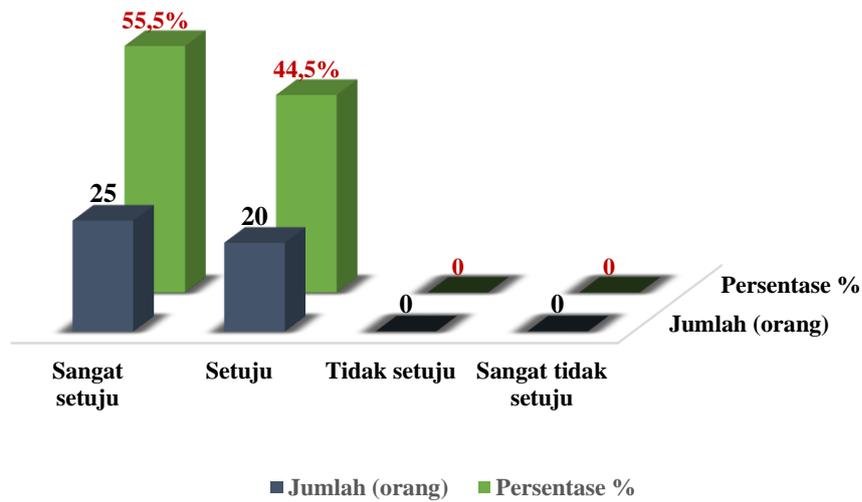
Gambar 4.22 Penurunan Pendapatan



Berdasarkan data diatas mengenai penurunan pendapatan bantuan langsung tunai dengan keseluruhan responden yaitu 45 orang. Mengalami penurunan pendapatan akibat dari pemutusan hubungan kerja sebanyak 3 responden dengan persentase 6,7 persen, pengurangan gaji/upah tidak ada responden, kemudian karena omset usaha menurun sebanyak 12 responden dan lainnya sebanyak 30 responden. Dalam hal lainnya bahwa yang menerima bantuan langsung tunai dana desa dikecamatan Bandar Pasir Mandoge mayoritas adalah orang yang sudah lanjut usia.

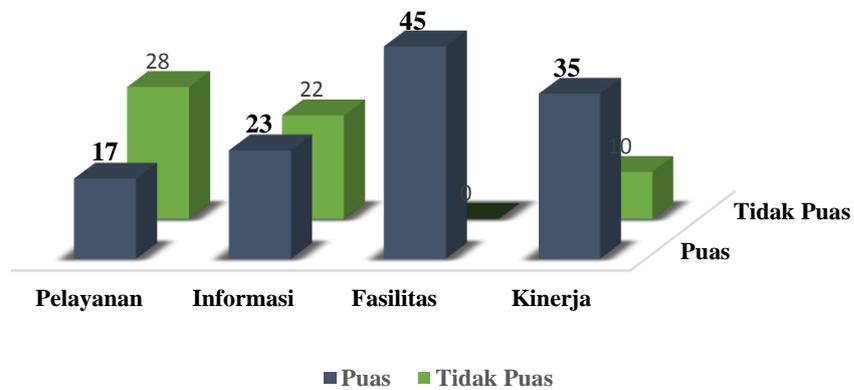
Gambar 4.23

Membantu meningkatkan Daya Beli dan memnuhi kebutuhan pokok rumah tangga dimasa pandemi



Berdasarkan data grafik diatas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa membantu daya beli dan kebutuhan pokok rumah tangga dengan jumlah responden 45. Yang menyatakan sangat setuju sebanyak 25 responden dengan persentase 55,5 persen, yang menyatakan setuju sebanyak 20 responden, tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 responden. Artinya dalam hal bantuan langsung tunai dana desa responden merasakan manfaat dari segi ekonomi dan mendukung program keluarga penerima manfaat tersebut.

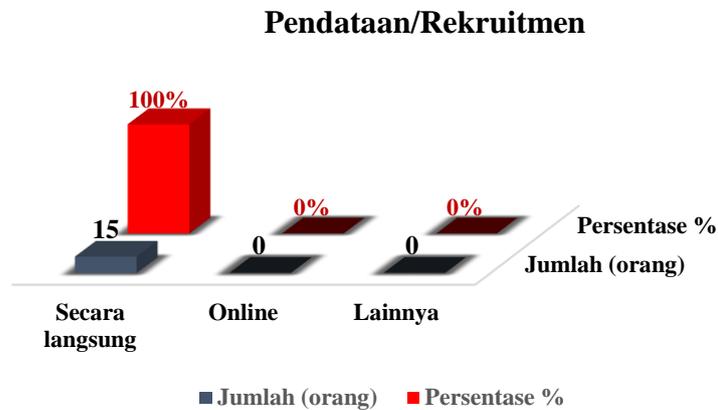
Gambar 4.24 Pelayanan, informasi, fasilitas, kinerja



Berdasarkan data grafik diatas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari segi pelayanan 17 responden merasakan kepuasan terhadap pemerintahan desa dan 28 responden merasakan tidak puas, kemudian segi informasi sebanyak 23 responden merasa puas dengan informasi yang diberikan oleh pemerintahan desa dan 22 responden tidak puas. Dari segi fasilitas keseluruhan responden yaitu 45 merasakan kepuasan yang diberikan oleh pemerintah desa tapi dengan tingkat point kepuasan yang berbeda-beda, ada responden yang tingkat kepuasannya 5 (sangat puas), ada yang hanya sekedar puas. Selanjutnya dari segi kinerja pemerintahan desa 35 responden merasakan kepuasan dan 10 responden tidak puas. Dalam hal ini pemerintahan desa perlu adanya evaluasi terkait dengan pelayanan, informasi, sarana/fasilitas dan kinerjanya.

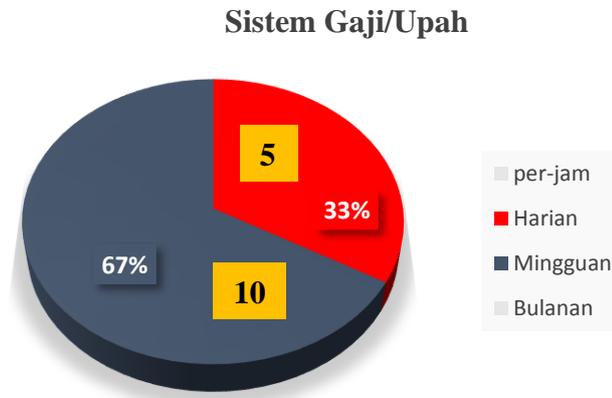
b. Padat Karya Tunai Desa

Gambar 4.25 Proses Pendataan/Rekrutmen



Berdasarkan data grafik diatas mengenai proses pendataan/rekrutmen program Padat Karya Tunai Desa keseluruhan responden yaitu 15 orang dilakukan pendataan dan penunjukkan sebagai pekerja yang dilakukan oleh pemerintahan desa dengan persentase 100 persen, pendataan menggunakan media online dan lainnya tidak ada responden. Pendataan secara langsung padat karya tunai desa setelah dilakukannya survei oleh pemerintah desa yang memiliki keahlian dibidang pekerjaan yang dibutuhkan dan dilakukan musyawarah desa dengan melibatkan lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang diberdayakan kemudian disetujui oleh kepala desa. padat karya tunai desa dengan memberdayakan masyarakat sekitar desa demi meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

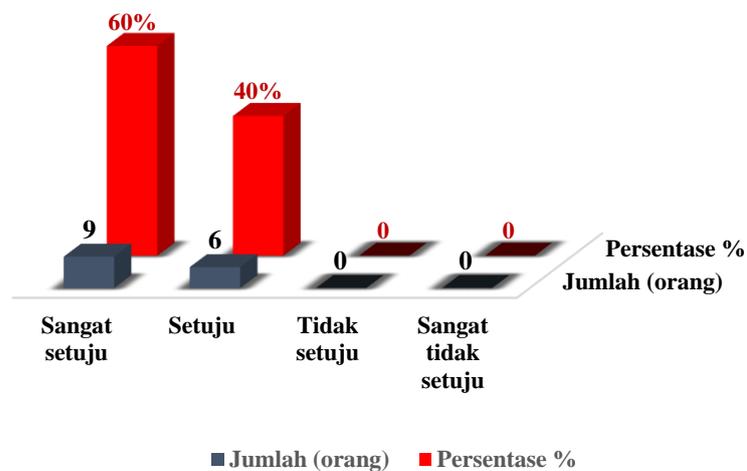
Gambar 4.26 Sistem Gaji/Upah



Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sistem gaji/upah dari ketiga desa tersebut bervariasi, ada yang menggunakan sistem harian dan mingguan. Pada sistem harian sebanyak 5 responden menerima upah secara harian dan 10 responden dengan sistem mingguan.

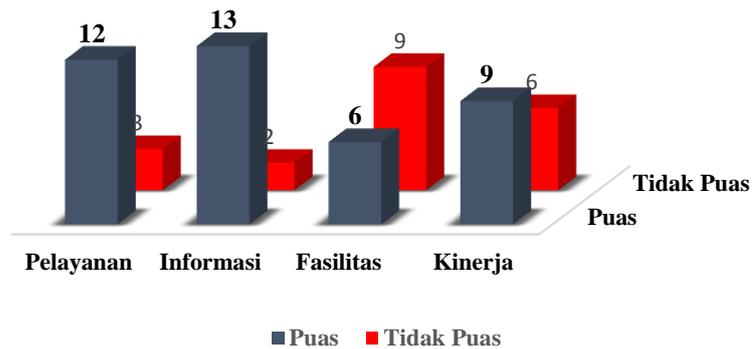
Gambar 4.27

Membantu meningkatkan daya beli dan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dimasa pandemi



Berdasarkan data grafik diatas Padat Karya Tunai Dana Desa membantu daya beli dan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dengan jumlah responden 15. Yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 responden dengan persentase 60 persen, yang menyatakan setuju sebanyak 8 responden dengan persentase 40 persen, tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 responden. Artinya dalam hal program padat karya tunai dana desa responden merasakan manfaat dari segi ekonomi dan mendukung program keluarga penerima manfaat tersebut.

Gambar 4.28 Pelayanan, informasi, fasilitas, kinerja



Berdasarkan data grafik diatas Padat Karya Tunai Dana Desa dari segi pelayanan 12 responden merasakan kepuasan terhadap pemerintahan desa dan 3 responden merasakan tidak puas, kemudian segi informasi sebanyak 13 responden merasa puas dengan informasi yang diberikan oleh pemerintahan desa dan 2 responden tidak puas. Dari segi fasilitas yaitu 6 responden merasakan kepuasan yang diberikan oleh pemerintah desa dan 9 responden tidak puas. Selanjutnya dari segi kinerja pemerintahan desa 9 responden merasakan kepuasan dan 6 responden tidak puas. Dalam hal ini tingkat kepuasan dan ketidak puas memiliki point yang

berbeda-beda dari masing-masing responden, dan pemerintahan desa perlu adanya evaluasi terkait dengan pelayanan, informasi, sarana/fasilitas dan kinerjanya.

Pemanfaatan Dana Desa dalam pandemi Covid-19 ini diarahkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa. Menurut hasil kuesioner dan wawancara terhadap pemerintahan desa (Kepala Desa) dan keluarga penerima manfaat, prioritas utama anggaran Dana Desa digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga serta dapat meningkatkan daya beli masyarakat desa melalui bantuan langsung tunai dana desa dan padat karya tunai desa.

Bantuan langsung tunai dana desa diberikan kepada masyarakat dengan kriteria yaitu; keluarga miskin yang berdomisili didesa tersebut, tidak menerima bantuan lain dari pemerintah, kehilangan pekerjaan karena pandemi, memiliki identitas kependudukan. Besar jumlah bantuan Rp 300 ribu rupiah perbulan dengan pemberian bantuan kepada penerima per-tiga bulan sekali, dalam penyalurannya dilakukan pengawasan dan disaksikan langsung oleh Kepala Desa, lembaga kemasyarakatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh masyarakat. Proses pendapataan nama penerima dilakukan oleh Kepala Dusun kemudian diserahkan kepemerintah desa lalu dibahas dalam forum musyawarah desa khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta jajarannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lemabaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Dusun (kadus), Tokoh Masyarakat agar tidak terjadinya kesalahan penerima sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. Dari hasil responden yang didapat mayoritas penerima bantuan langsung tunai dana desa adalah lansia (lanjut usia), ada juga penerima yang pekerjaan utamanya adalah Wiraswasta/pedagang, Petani, Ibu rumah tangga,

sudah tidak memiliki suami/istri. Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan jika penerima sebagai petani digunakan sebagai tambahan modal pertaniannya, contoh : pembelian pupuk.

Program Padat karya tunai desa menjadi prioritas selanjutnya yang bersumber dari Dana Desa. Hasil survei lapangan yang dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan program padat karya tunai dari 3 desa yang diambil menjadi sampel dapat disimpulkan kurang efektif. Pertama melihat dari mayoritas pekerjaan masyarakat desa tersebut adalah sebagai petani dan karyawan perusahaan perkebunan yang pendapatannya masih relatif normal disaat pandemi covid-19. Kedua pemerintahan desa hanya fokus pada program bantuan langsung tunai dana desa, penyelenggaraan pemerintah desa dan aktivitas penanganan pandemi covid-19, dari tiga desa yang melakukan program padat karya tunai, begitupun dalam realisasinya selama pandemi covid-19 hanya 1 kali dilaksanakan pada tahun 2020. Ketiga sebagian pekerja utama tidak berasal dari desa tersebut melainkan dari desa lain yang ahli dibidangnya. Bagi masyarakat yang dipakai jasanya pada program padat karya tunai desa sangat membantu sekali untuk aktivitas perekonomian mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan/kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur. Jika dilihat perkembangan APBN periode waktu tahun 2018 sampai 2021 mengalami peningkatan disetiap tahunnya, hal tersebut dibuktikan dengan data anggaran yang dipublikasi oleh Kementerian Keuangan. Namun dalam hal realisasinya terdapat perbedaan, fokus atau prioritas pemerintah pada APBN tahun 2018 dan 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) sedangkan pada APBN tahun 2020 dan 2021 lebih diutamakan pada program pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan sumber daya manusia serta infrastruktur yang terus dijalankan. Perubahan

prioritas pada APBN tersebut disebabkan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk negara Indonesia.

2. Perkembangan dana desa di kabupaten asahan mengalami kenaikan hampir di setiap tahunnya, melalui data Dana Desa tahun 2015-2021. Peningkatan atau penambahan dana desa di kabupaten Asahan dilakukan untuk pengembangan potensi desa di Kabupaten Asahan seperti infrastruktur pedesaan, bangunan untuk mendukung perekonomian seperti pasar desa, irigasi. Sehingga pemanfaatan dana desa pada periode tahun 2015-2021 menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Asahan. Hal ini mengartikan bahwa perkembangan Dana Desa di Kabupaten Asahan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan sudah cukup baik.
3. Efektivitas kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge selama pandemi secara kuantitas menunjukkan keadaan lebih baik dan cukup. Selama pandemi covid-19 keadaan ekonomi masyarakat mengalami penurunan, baik dari segi pendapatan dan juga daya beli masyarakat, hal ini terlihat dari adanya masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan selama pandemi, terkena dampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), omzet usaha menurun. Namun dengan nominal bantuan yang diberikan oleh pemerintah hanya dapat membantu tambahan pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga saja. Melihat tingkat ekonomi masyarakat rumah tangga yang berbeda-beda membuat pemerintah desa harus lebih teliti dalam penentuan keluarga penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh

pemerintah. Hal ini juga harus didukung oleh setiap elemen masyarakat dalam proses pengelolaannya yang bersifat transparansi dan akuntabel sesuai dengan asas pengelolaan keuangan.

5.2 Saran

1. Pemerintah desa harus lebih aktif untuk mengedukasi dan mensosialisasikan prioritas penggunaan Dana Desa dimasa pandemi agar masyarakat dapat informasi yang akurat dan ikut andil dalam pengawasan Dana Desa, karena rata-rata masyarakat tidak mengetahui Dana Desa. Serta Aparatur Desa masih kurang transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terlihat masih minimnya informasi baik dari segi digital maupun cetak seperti baliho atau spanduk yang mendukung ketransparansian penggunaan Dana Desa.
2. Masyarakat keluarga penerima manfaat harus sadar untuk tidak selalu bergantung pada bantuan – bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
3. Proses pendataan keluarga penerima manfaat harus bersifat transparan dan akuntabel. Melihat banyaknya tindakan kecurangan dan nepotisme dalam penentuan penerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhiani, K.D., Erfit & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Volume 7, halaman 1-34.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2015-2020*. www.bps.go.id. Diakses pada 20 Maret 2021.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2020*. www.bps.go.id. Diakses pada 19 Maret 2021.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-IV Tahun 2020*. www.bps.go.id. Diakses pada 19 Maret 2021.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). *Status Desa Dalam Indeks Pembangunan Desa 2014*. www.bps.go.id. Diakses pada 8 Oktober 2021.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). *Status Desa Dalam Indeks Pembangunan Desa 2020*. www.bps.go.id. Diakses pada 8 Oktober 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan. *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020*. <https://asahankab.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan. *Grafik Jumlah penduduk Kabupaten Asahan 7 Tahun Terakhir, Kepadatan Penduduk Tahun 2017*. <https://asahankab.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan. *Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan Kecamatan Tahun 2017*. <https://asahankab.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan. *penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin Tahun 2015, penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut jenis kegiatan utama*. <https://asahankab.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan. *PDRB atas harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2016-2020*. <https://asahankab.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan. *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020*. <https://asahankab.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan. *Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020*. <https://asahankab.bps.go.id>.
- Boediono. (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Case, K. E., & Fair, R. C. (2008). *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dana Desa Kabupaten Asahan (2021). *Anggaran Dana Desa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tahun 2021*. www.dinaspmd.asahankab.go.id.
- Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi*.
- Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. <https://www.kemendes.go.id>. Diakses pada 8 Oktober 2021.
- Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. <https://www.kemendes.go.id>. Diakses pada 8 Oktober 2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2021*. <http://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 20 Maret 2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Anggaran Dana Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2020*. <http://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 20 Maret 2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Anggaran Dana Desa Kabuapten di Sumatera Utara Tahun 2018, 2019, 2020, 2021*. <http://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 20 Maret 2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *APBN Tahun 2018, 2019, 2020, 2021*. <http://www.kemenkeu.go.id>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. <http://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 20 Maret 2021.
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan*. (Edisi Pertama). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlanga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi Keempat*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.

- Mangkoesebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, G.N. (2007). *Macroeconomics*. Jakarta: Erlanga.
- Pemerintah Kabupaten Asahan, *Peta Kabupaten Asahan, luas wilayah, kondisi iklim*. <https://asahankab.go.id>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (Edisi kedua ed.). Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Suryana, (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryana. (2000). *Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas)*. Jakarta: Erlanga.
- Yuliana. (2020). *Corona virus diseases (Covid-19) Sebuah tinjauan literature*. Wellness and Healthy Magazine. Vol 2, No 1.
- https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJ_M_01cea89f40_BAB%20II7.%20Bab%202.pdf.

LAMPIRAN

KUESIONER

No. Kuesioner :

Hari/Tanggal :

Yang terhormat,

Bapak/Ibu Responden

Saya **Hafiz Fadli**, mahasiswa program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sedang melakukan penelitian mengenai **ANALISIS KEBIJAKAN TRANSFER PAYMENT PADA DANA DESA DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS ; KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGGE, KABUPATEN ASAHAN SUMATERA UTARA)**.

Kuesioner ini semata-mata bagian dari Tugas Akhir yang saya kerjakan. Anda merupakan responden yang tepat, sehingga saya sangat mengharapkan partisipasi Anda dengan mengisi kuesioner penelitian ini dan memberikan jawaban atas pertanyaan maupun pernyataan yang diajukan secara lengkap dan benar. Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dan partisipasi Anda dalam penelitian ini.

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama :
2. Usia : tahun
3. Alamat :
4. Jenis kelamin : Laki-Laki Perempuan

II. DATA KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI

1. Jenis pekerjaan saudara
 - PNS/Pegawai BUMN, BUMD, SWASTA
 - Petani/Nelayan
 - Guru atau Dosen
 - Ibu Rumah Tangga
 - Wiraswasta/Pedagang
 - Lainnya
2. Pendidikan terakhir
 - Sekolah Dasar (SD)
 - D-III (ahli madya)
 - SMP Sederajat
 - S-1 (Sarjana)
 - SMA Sederajat
 - S-2/S-3(Pasca Sarjana)
3. Rata-rata tingkat penghasilan bulanan
 - < Rp 2 juta
 - Rp 4,6 s/d Rp 7 Juta
 - Rp 2 Juta s/d Rp 4,5 Juta
 - > Rp 7 Juta
4. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan
 - 0 orang (tidak ada)
 - 4-6 orang
 - 1-3 orang
 - > 6 orang

III. INFORMASI DAN PENDATAAN (BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA)

1. Bagaimana anda mengetahui informasi tentang program bantuan langsung tunai dana desa ?
 - Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten
 - Media
 - Masyarakat/Orang lain
 - Lainnya, sebutkan
2. Bagaimana proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa ?
 - Secara langsung
 - Online
 - Lainnya, sebutkan
3. Sudah berapa kali anda menerima bantuan langsung tunai dana desa ?
 - < 2 kali
 - 2 – 4 kali
 - 5 – 7 kali
 - > 7 kali
4. Bagaimana proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ?
 - Pemerintah desa mendatangi rumah penerima
 - Penerima mengambil langsung dengan lokasi yang sudah ditetapkan
 - Transfer melalui rekening bank
 - Lainnya, sebutkan
5. Bagaimana kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah desa pada saat pengambilan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tersebut ?
 - Buruk
 - Cukup
 - Baik
6. Apakah anda menerima bantuan lain selain BLT Dana Desa ?
 - Ya. Jika Ya, bantuan apa yang anda terima, sebutkan
 - Tidak
7. Jaminan kesehatan apa yang anda miliki ?
 - BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
 - Prudential
 - Asuransi Kesehatan Lainnya
8. Selama pandemi apakah anda mengalami penurunan pendapatan ? jika ya, disebabkan karna apa ?
 - Pemutusan hubungan kerja (PHK)
 - Pengurangan gaji/upah
 - Omzet usaha menurun
 - Lainnya, sebutkan
9. Bantuan tersebut anda gunakan untuk keperluan apa ?
 - Kebutuhan pokok
 - Modal usaha

- Lainnya, sebutkan
10. Apa harapan anda terhadap pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya desa dimasa pandemi ?
- Mengoptimalkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi
 - Program kerja yang dapat membantu perekonomian masyarakat
 - Lainnya, sebutkan

III. INFORMASI DAN PENDATAAN (PADAT KARYA TUNAI DESA)

1. Bagaimana anda mengetahui informasi tentang program padat karya tunai dana desa ?
 - Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa
 - Media
 - Masyarakat/Orang lain
 - Lainnya, sebutkan.....
2. Bagaimana proses pendaftaran yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk program padat karya tunai dana desa ?
 - Secara langsung
 - Online
 - Lainnya, sebutkan.....
3. Berapa jam anda bekerja dalam 1 hari ?
 - < 6 jam
 - 6 – 7 jam
 - 8 – 9 jam
 - 10 jam
 - > 10 jam
4. Berapa upah yang anda terima dalam 1 hari ?
 - < Rp 100.000
 - Rp 100.000 – Rp 150.000
 - Rp 160.000 – Rp 200.000
 - > Rp 200.000
5. Jenis pekerjaan yang anda kerjakan ?
 - Pembangunan jalan
 - Drainase
 - Sarana & prasarana desa
 - Lainnya, sebutkan.....
6. Selama pandemi apakah anda mengalami penurunan pendapatan ? jika ya, disebabkan karna apa ?
 - Pemutusan hubungan kerja (PHK)
 - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
 - Dirumahkan
 - Pengurangan gaji/upah
 - Omzet usaha menurun
7. Apa harapan anda terhadap pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya didesa ?
 - Lebih mengutamakan bantuan untuk masyarakat desa
 - Memperbanyak lapangan kerja

- Memperbanyak program yang meningkatkan pendapatan masyarakat
 - Lainnya, sebutkan.....
8. Jaminan kesehatan apa yang anda miliki ?
- BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
 - Prudential
 - Asuransi Kesehatan Lainnya

Petunjuk pengisian :

Isilah jawaban sesuai pendapat anda dengan memberikan tingkat penilaian dengan tanda checklist (√) pada kolom score yang tersedia.

Keterangan untuk skala Penilaian :

STS : Sangat Tidak Setuju

N : Netral

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

IV. MONITORING

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Mengetahui secara jelas tentang Dana Desa					
2	Ada sosialisasi yang dilakukan Aparatur Desa terkait Dana Desa					
3	Pemerintah desa melakukan musyawarah desa dalam pengelolaan Dana Desa yang melibatkan masyarakat desa					
4	Mengetahui adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau Padat karya Tunai Desa					
5	Adanya sosialisasi terkait penerimaan BLT Dana Desa atau Padat karya Tunai Desa					
6	Mengetahui secara jelas mengenai prosedur mengikuti/mendapatkan BLT Dana Desa atau Padat karya Tunai Desa					
7	Pemerintah desa melakukan survei dalam penentuan penerima BLT Dana Desa atau Padat karya Tunai Desa					
8	Pemerintah desa melakukan musyawarah dalam penentuan penerima BLT Dana Desa atau Padat karya Tunai Desa					
9	Memperoleh arahan dan kordinasi yang baik dari pemerintah desa					
10	Adanya pengawasan oleh pemerintah desa dalam proses penyaluran BLT Dana Desa atau Padat karya Tunai Desa					
11	Proses pendataan dan penerimaan dilakukan secara transparant dan akuntabel					
12	Besaran jumlah yang diberikan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat					
13	Pemerintah Desa melakukan evaluasi setelah proses penyaluran bantuan dan rekrutmen					
14	Membantu meningkatkan daya beli masyarakat dimasa pandemi					
15	Membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga					

V. EVALUASI

NO	PERNYATAAN	TIDAK PUAS			PUAS		
		1	2	3	4	5	6
1	Pemerintah Desa memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penerima bantuan						
2	Pemerintah Desa selalu mengkomunikasikan informasi yang mudah dipahami oleh penerima						
3	Pemerintah Desa memiliki kompetensi yang baik dan memberikan solusi jika mengalami kendala						
4	Pemerintah Desa bersikap sopan dan santun sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman						
5	Pemerintah Desa memberikan informasi yang transparan dan akuntabel dalam proses pendataan						
6	Ketersediaan Informasi yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah Desa						
7	Pemerintah Desa menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi baik masukan, kritik, saran, dan lainnya yang bersifat membangun						
8	Kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa						
9	Merasa puas dengan program bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan oleh pemerintah						

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 181/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/26/2/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 26/2/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hafiz Fadli
NPM : 1705180013
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset Ekonomi dan Bisnis

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan produktivitas Sumberdaya Manusia.
2. Pentingnya Pengawasan dan Evaluasi Dana Desa dalam Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat

Rencana Judul : 1. Analisis Kebijakan Transfer Payment Pada Dana Desa, Studi Kasus : Kecamatan Bandar Pasir Mandoge
2. Pengaruh Sektor Pariwisata Kecamatan Bandar Pasir Mandoge terhadap Peningkatan Taraf Hidup dan Pemerataan Ekonomi
3. Efektivitas Program Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan, Pembangunan Ekonomi dan Produktifitas masyarakat Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Objek/Lokasi Penelitian : Pemerintah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Hafiz Fadli)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 181/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/26/2/2021

Nama Mahasiswa : Hafiz Fadli
NPM : 1705180013
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset Ekonomi dan Bisnis
Tanggal Pengajuan Judul : 26/2/2021
Nama Dosen pembimbing^{*)} : Roswita Hafni
Judul^{**)} : Analisis Kebijakan Transfer Payment
Pada Dana Desa di Era Pandemi covid-19
(studi kasus; Kecamatan Bandar Pasir Mandage)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 27 Februari 2021

Dosen Pembimbing

(Dra. Roswita Hafni...)

Keterangan:

*) Data oleh Pimpinan Program Studi

**) Data oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Pihak dan Dosen pembimbing, scan/foto dan upload/foto ke-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Pada hari ini Jum'at, 07 Mei 2021 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

Nama : Hafiz Fadli
N.P.M. : 1705180013
Tempat / Tgl.Lahir : BP Mandoge, 27 Juli 1999
Alamat Rumah : Jalan Al Falaah 5 No.21, Glugur Darat I Kota Medan
Judul Proposal : Analisis Kebijakan Transfer Payment Pada Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19 Studi Kasus Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	✓
Bab I	perbaiki identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah
Bab II	Kerangka Analisis penelitian
Bab III	Populasi dan Sampel
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Jum'at, 07 Mei 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj. Roswita Hafni, M.Si

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pemanding

Dr. Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari *Jum'at, 07 Mei 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Hafiz Fadli
N .P.M. : 1705180013
Tempat / Tgl.Lahir : BP Mandoge, 27 Juli 1999
Alamat Rumah : Jalan Al Falaah 5 No.21, Glugur Darat I Kota Medan
JudulProposal : Analisis Kebijakan Transfer Payment Pada Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19 Studi Kasus Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dra.Hj. Roswita Hafni, M.Si*

Medan, Hafiz Fadli

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj. Roswita Hafni, M.Si

Pembanding

Dr. Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan I



Asses. Prof. D. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : HAFIZ FADLI
N.P.M : 1705180013
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : Jl. AL-FALAH V NO.21 MEDAN
Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN TRANSFER PAYMENT PADA DANA DESA DI ERA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGÉ

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
11/5-2021	ACC Proposal Lembar 1.1 & 1.2 1.3 & 1.4 1.5 & 1.6 I, II dan III		-
10/7-2021	Amendok kelengkapan H Kendaraan dan Rincir - Peta DD, BLT, APBD - Kuesioner, SD, BLT & Peta		-
1/8-2021	- Peta terkumpul - Oles dan. (Bab IV)		-
13/9-2021	- Lembar Bab IV Bab V - Kerangka dasar dan - Faktor produksi, Difusi, dan - HPSK - Lampir.		-
16/9-2021	ACC Skripsi U Sidang		-

Medan, 16 September 2021

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email : rector@umsu.ac.id

Nomor : 1712/II.3-AU/UMSU-05/F / 2021
Lampiran :
Perihal : **IZIN RISET PENDAHULUAN**

Medan, 25 Dzulhijjah 1442 H
04 Agustus 2021 M

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Pimpinan
Kantor Desa Kec. Bandar Pasir Mandoge
Jln. Kec. Bandar Pasir Mandoge
Di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program **Studi Strata Satu (S-1)**

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Hafiz Fadli
Npm : 1705180013
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Semester : VIII (Delapan)
Judul : Analisis Kebijakan Transfer Payment Pada Dana Desa di Era Pandemi Covid-19
(Studi kasus : Kecamatan Bandar Pasir Mandoge)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb



Tembusan :

1. Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rector@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1712 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Pada Tanggal : **04 Agustus 2021**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Hafiz Fadli**
N P M : **1705180013**
Semester : **VIII (Delapan)**
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Kebijakan Transfer Payment Pada Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 (Studi kasus : Kecamatan Bandar Pasir Mandoge)**

Dosen Pembimbing : **Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **04 Agustus 2022**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : **Medan**
Pada Tanggal : **25 Dzulhijjah 1442 H**
04 Agustus 2021 M



Dekan

IL. SANURI, SE.,MM.,M.Si.

Tembusan :
1. Peringgal